



DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

*“Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan yang Cukup secara
Berkelanjutan untuk Memperkuat Kedaulatan Pangan”*

LAPORAN KEUANGAN

BAGIAN ANGGARAN 018

Audited

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025



Kelompok Keuangan dan BMN
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu - Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Semester II Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Juni 2026
Direktur Jenderal



Dr. Yudi Sastro, SP, MP
NIP. 197207021998031002

**PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Juni 2026
Direktur Jenderal



Dr. Yudi Sastro, SP, MP
NIP. 197207021998031002



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan BA.018.03 Belanja Sektorial Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp62.210.282.337,00 atau mencapai 833,09% dari estimasi Pendapatan-LRA yang dilaporkan sebesar Rp7.467.396.000,00.

Realisasi Belanja Negara (*netto*) sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.244.731.160.094,00 atau mencapai 89,37% dari alokasi anggaran sebesar Rp3.630.558.992.000,00 dengan realisasi terbesar adalah belanja barang, yaitu Rp3.191.944.156.496,00.

Realisasi belanja barang salah satunya adalah belanja 526, yaitu belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada kegiatan-kegiatan seperti Fasilitas Penerapan Budidaya Padi dan Jagung; Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai, Aneka Kacang dan Umbi Lainnya; Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat; Fasilitas Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI; Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan; serta Fasilitas Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.

Adapun realisasi belanja 526 (*netto*) adalah Rp2.994.194.174.935,00 atau 99,93% persen dari pagu anggarannya sebesar Rp2.996.421.921.537,00.

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.719.639.571.077,00 yang terdiri dari: Aset Lancar (netto) sebesar Rp2.600.326.011,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp1.429.185.978.379,00; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp897.799.016,00 dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp286.955.467.671,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp277.774.077.784,00 dan Rp1.441.639.571.077,00.

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.794.156.177,00. sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp3.257.319.224.914,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(3.250.525.068.737,00). Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp7.761.554.686,00 dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 (nihil) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(3.242.306.283.253,00).

Dari realisasi belanja 526 sebesar Rp2.994.194.174.935,00, menjadi Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sejumlah Rp2.995.730.094.250,00.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp1.505.565.483.810, ditambah Defisit-LO periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp(3.242.306.283.253,00). kemudian dikurang koreksi-koreksi yang mengurangi Ekuitas senilai Rp(3.914.585.021,00) pada Koreksi Nilai Persediaan, Koreksi atas Reklasifikasi, Selisih Revaluasi Aset, Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dan Koreksi Lain-lain, serta Transaksi Antar Entitas senilai Rp3.182.520.877.757,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.441.865.493.293,00.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025		% thd Angg	31 Desember 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	7.467.396.000	62.210.282.337	833,09	35.931.899.963
JUMLAH PENDAPATAN		7.467.396.000	62.210.282.337	833,09	35.931.899.963
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	46.394.994.000	43.947.710.489	94,73	41.685.222.539
Belanja Barang	B.4	3.575.183.288.000	3.191.944.156.496	89,28	3.055.453.693.925
Belanja Modal	B.5	8.980.710.000	8.839.293.109	98,43	2.246.009.365
JUMLAH BELANJA		3.630.558.992.000	3.244.731.160.094	89,37	3.099.384.925.829



II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
NERACA
PER 31 Desember 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Des 25	31 Des 24
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0,	50.000.000,
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.1	63.675.107,	0,
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	50.309.650,	0,
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.3.1	218.000.000,	220.000.000,
Piutang Bukan Pajak	C.4	1.090.944.140,	157.957.817,
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.4.1	(157.957.817,)	(29.892.350,)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.5	932.986.323,	128.065.467,
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.6	225.204.318,	225.204.318,
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.6.1	(225.204.318,)	(225.204.318,)
Persediaan	C.7	1.335.354.931,	3.560.191.517,
JUMLAH ASET LANCAR		2.600.326.011,	3.958.256.984,
ASET TETAP			
Tanah	C.12	1.257.696.492.936,	1.259.764.248.577,
Peralatan dan Mesin	C.13	412.391.792.380,	424.388.905.282,
Gedung dan Bangunan	C.14	200.421.765.345,	199.223.907.345,
Jalan, Irigasi dan Jaring	C.15	8.598.811.162,	7.900.731.162,
Aset Tetap Lainnya	C.16	2.387.979.575,	2.544.696.075,
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.18	(452.310.863.019,)	(449.359.871.372,)
JUMLAH ASET TETAP		1.429.185.978.379,	1.444.462.617.069,
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.8	2.076.167.350,	4.001.956.160,
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.8.1	(1.834.231.605,)	(3.372.806.129,)
TAGIHAN TUNTUTAN			
PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	C.9	241.935.745,	629.150.031,
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.10	7.009.199.801,	6.344.044.599,
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.10.1	(6.353.336.530,)	(5.400.603.279,)
PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA (NETTO)	C.11	655.863.271,	943.441.320,
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		897.799.016,	1.572.591.351,
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.19	1.017.057.080,	1.029.859.279,
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.20	277.865.963.135,	310.609.498.491,
Aset Lain-lain	C.21	91.275.880.225,	145.938.404.838,
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.22	(83.203.432.769,)	(137.707.292.348,)
JUMLAH ASET LAINNYA		286.955.467.671,	319.870.470.260,
JUMLAH ASET		1.719.639.571.077	1.769.863.935.664
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.23	277.774.077.784,	264.248.451.854,
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.24	0,	0,
Utang Muka dari KPPN	C.25	0,	50.000.000,
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.26	0,	0,
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		277.774.077.784,	264.298.451.854,
JUMLAH KEWAJIBAN		277.774.077.784	264.298.451.854
EKUITAS			
Ekuitas	C.27	1.441.865.493.293,	1.505.565.483.810,
JUMLAH EKUITAS		1.441.865.493.293,	1.505.565.483.810,
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.719.639.571.077	1.769.863.935.664



LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN
31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak lainnya	D.1	6.794.156.177.	8.162.743.292.
JUMLAH PENDAPATAN		6.794.156.177.	8.162.743.292.
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	44.017.785.525.	41.793.781.539.
Beban Persediaan	D.3	1.879.553.914.	15.865.919.181.
Beban Barang dan Jasa	D.4	67.898.899.356.	133.749.521.406.
Beban Pemeliharaan	D.5	8.848.407.353.	7.964.873.373.
Beban Perjalanan Dinas	D.6	118.527.481.793.	185.493.530.492.
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	2.995.730.094.250.	2.725.054.014.218.
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	21.202.712.062.	24.129.775.733.
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	(785.709.339).	1.076.040.809.
JUMLAH BEBAN		3.257.319.224.914.	3.135.127.456.751.
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.250.525.068.737)	(3.126.904.713.459.)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	457.230.798.	(365.820.907.)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	492.668.000.	934.209.498.
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.13	35.437.202.	1.300.030.405.
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	7.761.554.686.	26.507.289.817.
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	7.772.754.686.	26.507.289.817.
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.16	11.200.000.	0.
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		8.218.785.484.	26.141.468.910.
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(3.242.306.283.253)	(3.100.823.244.549)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.17	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(3.242.306.283.253)	(3.100.823.244.549)



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1	1.505.565.483.810.	1.536.382.708.942.
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.242.306.283.253.)	(3.100.823.244.549.)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(3.914.585.021.)	(274.486.332.)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	0.	0.
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	0.	310.169.000.
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.3	0.	0.
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.4	(3.092.818.702.)	(586.727.096.)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	(821.766.319.)	2.071.764.
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	3.182.520.877.757	3.070.280.505.749.
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	(63.699.990.517.)	(30.817.225.132.)
EKUITAS AKHIR	E.7	1.441.865.493.293.	1.505.565.483.810.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan salah satu Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, tugas Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 merupakan tahapan ke-4 dari RPJPN 2005-2025 yang memiliki tema "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan." Pada RPJMN ke empat (2020- 2025), masyarakat Indonesia diharapkan sudah mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Adapun prioritas Kementerian Pertanian yaitu peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan; serta peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi disektor riil dan industrialisasi. Pembangunan jangka menengah 2020-2025, sesuai target nasional yang didukung oleh sektor pertanian bahwasanya tidak ada lagi visi misi K/L dan hanya ada Visi Misi Presiden menjadikan ruang lingkup dukungan sektor pertanian dalam pembangunan nasional semakin meluas diantaranya:

1. Peningkatan investasi pertanian
2. Peningkatan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
3. Peningkatan produksi komoditas pertanian
4. Penurunan tingkat kehilangan hasil (losses)
5. Peningkatan efisiensi biaya produksi
6. Dukungan terhadap peningkatan serapan tenaga kerja dan pengusaha pertanian milenial
7. Peningkatan ekspor komoditas dan hasil pertanian
8. Penurunan daerah rawan pangan dan stunting
9. Family farming dan pertanian masuk sekolah (dunia pendidikan)
10. Pemanfaatan dan pengembangan pertanian dalam kluster daerah utama, andalan dan pengembangan.

Tanaman pangan sebagai salah satu subsektor pertanian memiliki posisi strategis dalam penyediaan kebutuhan, sumber lapangan kerja dan pendapatan, serta sumber devisa. Selain itu, kedudukan subsektor tanaman pangan sangat bersentuhan dengan prioritas keenam dan

ketujuh dari nawacita. yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing serta mewujudkan kemandirian ekonomi.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki batasan kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi tertentu. Sesuai prioritas pembangunan Kabinet Kerja 2020-2025. telah ditetapkan lima komoditas pangan utama sebagai sasaran swasembada. tiga diantaranya adalah komoditas tanaman pangan yaitu Padi, Jagung, dan Kedelai. serta komoditas di luar tanaman pangan yaitu Gula dan Daging.

Selain itu. selama tahun 2020-2025 terdapat empat komoditi yang harus ditingkatkan produksinya yaitu padi dalam rangka swasembada. jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. serta ubi kayu sebagai penyedia bahan baku bio-industri.

Sebagai penanggung jawab simpul koordinasi dalam pembangunan tanaman pangan. dan dengan mempertimbangkan permasalahan. tantangan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini. maka visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah ***"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat. mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"***. Untuk mewujudkan visi tersebut. misi yang harus dilaksanakan adalah:

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; serta
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Untuk mengimplementasikan visi dan misi tersebut. ditetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan swasembada padi. jagung. dan meningkatnya produksi kedelai;
- b. Berkembangnya komoditas tanaman pangan bernilai ekonomi; dan
- c. Mendukung penyediaan bahan baku bioindustri.

Oleh karena itu sasaran strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah: Terwujudnya peningkatan produksi dan daya saing Tanaman Pangan; dan Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan mendukung penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi berkelanjutan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyatakan bahwa Kelembagaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

- perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lain
3. Direktorat Serealia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung dan serealia lain.
 4. Direktorat Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain.
 5. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan.
 6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.
 7. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan peramalan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), serta rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura.
 8. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pengembangan serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultur.

A.2. Implementasi Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan melalui Aplikasi MonSAKTI LK

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah mengimplementasikan Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan melalui Aplikasi SAKTI LK sejak tahun 2022 sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S- 29/PB.6/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester II Tahun 2022 (Audited) serta Pelaksanaan Rekonsiliasi dan mempertimbangkan implementasi rekonsiliasi menggunakan Aplikasi MonSAKTI yang sedang berjalan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Semester II Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Pertanian.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Semester II Tahun 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Jumlah entitas akuntansi lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah 70 satker. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 70 satker (100%). Rincian satker tersebut tersaji pada **Tabel A.1** berikut:

Tabel A.1 Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

No.	Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
1	03	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1	-	2	-	33	-	34	-	70
Jumlah			1	-	2	-	33	-	34	-	70

Keterangan:

M : Menyampaikan

TM : Tidak Menyampaikan

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Semester II Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) laporan keuangan seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui aplikasi MonSAKTI LK per tanggal 26 Juli 2025.

Pendekatan yang dilakukan dalam menyusun laporan keuangan yaitu dengan cara:

1. Satker melakukan Pengambilan data LK dari aplikasi MonSAKTI yang sudah melalui proses verifikasi awal oleh Tim Verifikator Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
2. Proses kapitalisasi aset tetap dilakukan melalui pengiriman secara elektronik dari aplikasi SAKTI secara berjenjang.
3. Penyusunan laporan keuangan berjenjang dari Satker ke Eselon I Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.

Laporan SAKTI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK adalah sistem yang dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sementara SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Beban yang berasal dari belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (526) dan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dan jasa (57) diakui dan disajikan sebagai beban apabila sudah diterbitkan berita acara serah terima (BAST).

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya seperti pada **Tabel A.3**.

Tabel A.3 Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- b) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

Pada peraturan tersebut pada Pasal 12 Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

1. Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526111);
 2. Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526112);
 3. Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526113);
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526114);
 5. Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526115);
 6. Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemda (526211);
 7. Belanja Barang Penunjang Kegiatan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemda (526212); dan
 8. Belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).
- Sedangkan pada Pasal 36 bahwa persediaan yang langsung diserahkan kepada pihak penerima, transaksi penyerahan/dijual kepada masyarakat/pemda dibuktikan dengan dokumen sumber pengeluaran persediaan untuk:

- a) Satuan Kerja Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dapat berupa:
 - 1) BAST Persediaan antara pihak pelaksana pengadaan dengan penerima dan diketahui oleh satuan kerja;
 - 2) BAST Persediaan antara kepala satuan kerja atau PPK dengan penerima;
 - 3) BAST Persediaan antara Eselon I dengan penerima/SKPD; atau
 - 4) Surat pernyataan persediaan telah diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah dari Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk.

b) Kantor Pusat dan Kantor Daerah dapat berupa:

- 1) Surat Keputusan Hibah;
- 2) BAST Persediaan antara Eselon I dengan penerima/SKPD;
- 3) BAST Persediaan antara kepala satuan kerja/PPK dengan penerima;
- 4) BAST Persediaan antara pihak pelaksana pengadaan dengan penerima dan diketahui oleh satuan kerja; atau
- 5) Surat pernyataan persediaan telah diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah dari Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk.

Disamping itu, Pasal 43 menjelaskan bahwa seluruh pelaporan persediaan pada tanggal pelaporan dicatat berdasarkan *opname* fisik. Persediaan dilakukan untuk mengetahui jumlah Persediaan dan kondisi catatan dalam pembukuan pengelolaan Persediaan yang belum dipakai *Opname* fisik Persediaan sebagaimana dimaksud dilakukan secara sensus per semester atau periode laporan.

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000.00 (duapuluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar

pendekatan biaya. dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kementerian Keuangan.

Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.
- Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.
- Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2015 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum penggolongan masa manfaat Aset Tetap seperti pada **Tabel A.4** di bawah ini.

Tabel A.4. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum penggolongan masa manfaat Aset Tak Berwujud tampak pada **Tabel A.5.**

Tabel A.5. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi. Hak Paten Sederhana. Merk. Desain Industri. Rahasia Dagang. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran. Paten Biasa. Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan. Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan. Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban Jangka Pendek
 Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sampai dengan 31 Desember 2025 setelah revisi senilai Rp3.630.558.992.000,00 yang sebelumnya senilai Rp3.547.305.410.000,00 dan estimasi pendapatan senilai Rp7.467.396.000,00.

Adapun perbandingan pagu anggaran awal dan pagu anggaran per 31 Desember 2025 seperti pada **Tabel B.1**.

Tabel B.1 Perbandingan Estimasi dan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Tahun 2025

Uraian	Pagu Awal	Pagu per 31 Desember 2025	Naik/Turun (%)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	4.543.946.000,	4.543.946.000,	0,00%
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	2.123.450.000,	2.123.450.000,	0,00%
Pendapatan Jasa Lainnya	800.000.000,	800.000.000,	0,00%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	-	-	0,00%
Pendapatan Denda	-	-	0,00%
Pendapatan Lain-lain	-	-	0,00%
Jumlah	7.467.396.000	7.467.396.000	0,00%
Belanja Pegawai	42.584.785.000,	46.394.994.000,	8,95%
Belanja Barang	3.501.470.625.000,	3.575.183.288.000,	2,11%
Belanja Modal	3.250.000.000,	8.980.710.000,	176,33%
Jumlah	3.547.305.410.000	3.630.558.992.000	2,35%

Berdasarkan kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, maka perubahan pagu anggaran seperti tampak pada **Tabel B.2**.

Tabel B.2 Perbandingan Anggaran Belanja Awal dan Revisi Per Kegiatan

NO	Kegiatan	PAGU DEFINITIF (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	NAIK/TURUN (Rp)
1	1761. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Rp 7.432.581.000	9.463.531.000,	2.030.950.000,00
2	1762. Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal	Rp 1.808.178.881.000	2.141.578.608.000,	333.399.727.000,00
3	4579. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Rp 41.685.900.000	33.249.473.000,	-8.436.427.000,00
4	4580. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	Rp 33.000.000.000	27.047.417.000,	-5.952.583.000,00
5	1766. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	Rp 142.747.739.000	128.107.048.000,	-14.640.691.000,00
6	5885. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Rp 1.514.260.309.000	1.291.112.915.000,	-223.147.394.000,00
JUMLAH		3.547.305.410.000,00	3.630.558.992.000	83.253.582.000,00

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp62.210.282.337,00 atau mencapai 833,09% dari estimasi pendapatan sebesar Rp7.467.396.000,00.

Estimasi pendapatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdapat pada Unit Pelaksana Teknis BPSBTPH, BPMPT, BPOPT dan BBPPMBTPH.

Ditjen Tanaman Pangan sebagai Direktorat Teknis tidak ditargetkan dalam penerimaan negara sehingga tidak semua penerimaan memiliki estimasi.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat pada **Tabel B.3**.

Tabel B.3 Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2025

Uraian	Pendapatan per 31 Desember 2025				
	Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengembalian Pendapatan	Pendapatan Netto	% Real Pendapatan
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	4.543.946.000,	1.002.849.314,	-	1.002.849.314	22,07
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	2.123.450.000,	2.381.266.135,	-	2.381.266.135	112,14
Pendapatan Jasa Lainnya	800.000.000,	862.894.292,	-	862.894.292	107,86
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	-	1.246.884.681,	-	1.246.884.681	-
Pendapatan Denda	-	2.976.139.329,	-	2.976.139.329	-
Pendapatan Lain-lain	-	53.740.248.586,	-	53.740.248.586	-
Jumlah Pendapatan Bruto	7.467.396.000	62.210.282.337	-	62.210.282.337	833,09

Secara umum realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 73,13% dibandingkan 31 Desember 2024 hal ini disebabkan Belanja Perjalanan tidak sesuai dengan rencana awal, sehingga banyak pengembalian belanja Tahun Anggaran yang Lalu ke Kas Negara, serta Denda keterlambatan.

**Tabel B.4 Perbandingan Realisasi Pendapatan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

URAIAN	31 Desember 2025			31 Desember 2024			NAIK (TURUN) %
	Realisasi Pendapatan	Pengemb. Pendapatan	Pendapatan Netto	Realisasi Pendapatan	Pengemb. Pendapatan	Pendapatan Netto	
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	1.002.849.314,	-	1.002.849.314	3.443.964.998,	-	3.443.964.998	(70,88)
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	2.381.266.135,	-	2.381.266.135	2.063.882.355,	-	2.063.882.355	15,38
Pendapatan Jasa Lainnya	862.894.292,	-	862.894.292	802.246.024,	-	802.246.024	7,56
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	1.246.884.681,	-	1.246.884.681	563.558.742,	-	563.558.742	121,25
Pendapatan Denda	2.976.139.329,	-	2.976.139.329	2.765.021.646,	-	2.765.021.646	7,64
Pendapatan Lain-lain	53.740.248.586,	-	53.740.248.586	26.293.226.198,	-	26.293.226.198	104,39
Jumlah	62.210.282.337	-	62.210.282.337	35.931.899.963	-	35.931.899.963	73,13

Kenaikan pendapatan pada tahun 2025, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum 15,38%, Pendapatan Jasa Lainnya 7,56%, Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan 121,25%, Pendapatan Denda 7,64%, Pendapatan Lain-lain 104,39%.

Penurunan pendapatan pada tahun 2025 terdapat pada Pendapatan dari penjualan pengelolaan BMN dan iuran Badan Usaha (70,88%).

Rincian penerimaan berdasarkan akun pendapatan sebagai berikut :

Kode	Uraian	Estimasi Pendapatan	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	4.448.000.000,	415.805.500,	0,	415.805.500,	9,35
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	45.000.000,	492.668.000,	0,	492.668.000,	1094,82
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	14.946.000,	83.567.400,	0,	83.567.400,	559,13
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	36.000.000,	10.808.414,	0,	10.808.414,	30,02
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	463.450.000,	632.900.000,	0,	632.900.000,	136,56
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	1.660.000.000,	1.748.366.135,	0,	1.748.366.135,	105,32
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	300.000.000,	271.393.292,	0,	271.393.292,	90,46
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	500.000.000,	591.501.000,	0,	591.501.000,	118,3
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0,	3.000.000,	0,	3.000.000,	0
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	0,	1.243.884.681,	0,	1.243.884.681,	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,	2.976.139.329,	0,	2.976.139.329,	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,	31.357.949,	0,	31.357.949,	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,	53.708.890.637,	0,	53.708.890.637,	0
	JUMLAH PENDAPATAN	7.467.396.000,	62.210.282.337,	0,	62.210.282.337,	833,09

B.2 BELANJA

Belanja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berupa belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.244.731.160.094,00 atau mencapai 89,37% dari pagu senilai Rp3.630.558.992.000,00, dengan realisasi terbesar adalah belanja barang senilai Rp3.191.944.156.496,00.

Tabel B.5 menunjukkan rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2025 berdasarkan jenis belanja.

Tabel B.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

URAIAN	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN BELANJA	REALISASI NETTO	% REALISASI ANGGARAN
Belanja Pegawai	46.394.994.000,	43.982.409.978,	34.699.489,	43.947.710.489	94,73%
Belanja Barang	3.575.183.288.000,	3.192.183.092.230,	238.935.734,	3.191.944.156.496	89,28%
Belanja Modal	8.980.710.000,	8.839.293.109,	0,	8.839.293.109	98,43%
JUMLAH BELANJA	3.630.558.992.000	3.245.004.795.317	273.635.223	3.244.731.160.094	89,37%

Realisasi belanja terbesar pada belanja barang dimana dalam belanja barang terdapat belanja bantuan pemerintah yang diserahkan ke masyarakat/pemda.

Komposisi anggaran dan realisasi per 31 Desember 2025 dapat dilihat dalam **Grafik 1**.

Grafik B.1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025



Terdapat 5 (lima) Direktorat Teknis yang mendukung Program Pembangunan Tanaman Pangan, Dit.Akabi, Dit.Seralia, Dit.Perbenihan dan Dit. PPHTP, disamping itu juga terdapat Balai Besar yaitu BBPOPT, BBPPMBTPH dan BPMPT.

Pada Direktorat Teknis terdapat kegiatan Bantuan Pemerintah yang diserahkan kepada Kelompok Tani berupa benih, Saprodi dan Alsintan, benih berupa benih padi, jagung dan kedelai, saprodi berupa obat-obatan dan pupuk, alsintan berupa alat pascapanen dan Unit Pengolah Hasil (UPH), adapun satuan target bantuan berupa Ha, Kg dan unit.

Dibandingkan dengan Tahun 2024, Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 4,69%. **Tabel B.7** menunjukkan perbandingan realisasi belanja netto per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan jenis belanja.

Tabel B.7 Perbandingan Realisasi Belanja Netto per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

URAIAN	'31 DESEMBER 2025		'31 DESEMBER 2024		NAIK (TURUN) %
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	46.394.994.000,	43.947.710.489,	44.307.720.000,	41.685.222.539,	5,43
Belanja Barang	3.575.183.288.000,	3.191.944.156.496,	3.225.825.169.000,	3.055.453.693.925,	4,47
Belanja Modal	8.980.710.000,	8.839.293.109,	8.702.266.000,	2.246.009.365,	293,56
Jumlah	3.630.558.992.000	3.244.731.160.094	3.278.835.155.000	3.099.384.925.829	4,69

Dari **Tabel B.7** secara umum dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan realisasi dari tahun anggaran sebelumnya 4,69%, secara detail kenaikan realisasi berbanding dengan pagu tahun berjalan Paling besar pada kenaikan belanja Modal senilai 293,56%.

B.3 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 43.947.710.489,00 dan Rp 41.685.222.539,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Adapun realisasi belanja pegawai berdasarkan pagu Pegawai Ta. 2025 sebagai berikut :

Akun	Uraian	Anggaran Setelah Revisi	REALISASI BELANJA			% Realisasi Anggaran
			JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
51	BELANJA PEGAWAI					
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	29.645.725.000,	29.509.117.580,	8.531.204,	29.500.586.376,	99,51
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	754.000,	399.978,	1.014,	398.964,	52,91
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2.217.310.000,	2.069.478.410,	3.090.394,	2.066.388.016,	93,19
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	759.593.000,	623.196.998,	1.540.397,	621.656.601,	81,84
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1.023.805.000,	516.805.000,	3.250.000,	513.555.000,	50,16
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.784.042.000,	3.175.571.000,	5.850.000,	3.169.721.000,	83,77
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	548.098.000,	350.088.762,	0,	350.088.762,	63,87
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1.948.327.000,	1.522.195.980,	651.780,	1.521.544.200,	78,09
511129	Belanja Uang Makan PNS	2.913.122.000,	2.892.989.000,	10.110.300,	2.882.878.700,	98,96
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	671.098.000,	624.865.000,	1.670.000,	623.195.000,	92,86
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.012.170.000,	1.984.358.276,	0,	1.984.358.276,	98,62
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	473.000,	50.176,	4.400,	45.776,	9,68
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	120.481.000,	112.316.691,	0,	112.316.691,	93,22
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	40.355.000,	26.466.106,	0,	26.466.106,	65,58
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	132.384.000,	107.658.666,	0,	107.658.666,	81,32
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	120.373.000,	111.967.355,	0,	111.967.355,	93,02
511628	Belanja Uang Makan PPPK	324.335.000,	245.964.000,	0,	245.964.000,	75,84
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	100.000.000,	76.410.000,	0,	76.410.000,	76,41
512211	Belanja Uang Lembur	32.549.000,	32.511.000,	0,	32.511.000,	99,88
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0,	0,	0,	0,	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	46.394.994.000,	43.982.409.978,	34.699.489,	43.947.710.489,	94,73

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan yang tidak signifikan sebesar 5,15% dibandingkan belanja pegawai per 31 Desember 2024.

Perbandingan belanja pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tampak pada **Tabel B.8.**

Tabel B.8 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2025			31 Desember 2024			NAIK (TURUN) %
	Realisasi Bruto	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto	Realisasi Bruto	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto	
Belanja Gaji Pokok PNS	29.509.117.580,00	8.531.204,00	29.500.586.376,00	29.335.887.100,		29.335.887.100,	0,56%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	399.978,00	1.014,00	398.964,00	412.798,	13.612,	399.186,	-0,06%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2.069.478.410,00	3.090.394,00	2.066.388.016,00	2.092.822.150,	0,	2.092.822.150,	-1,28%
Belanja Tunj. Anak PNS	623.196.998,00	1.540.397,00	621.656.601,00	620.630.734,	0,	620.630.734,	0,17%
Belanja Tunj. Struktural PNS	516.805.000,00	3.250.000,00	513.555.000,00	464.655.000,	0,	464.655.000,	9,52%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.175.571.000,00	5.850.000,00	3.169.721.000,00	3.134.372.000,	8.120.000,	3.126.252.000,	1,37%
Belanja Tunj. PPh PNS	350.088.762,00	0	350.088.762,00	344.840.863,	0,	344.840.863,	1,50%
Belanja Tunj. Beras PNS	1.522.195.980,00	651.780,00	1.521.544.200,00	1.515.098.820,	0,	1.515.098.820,	0,42%
Belanja Uang Makan PNS	2.892.989.000,00	10.110.300,00	2.882.878.700,00	2.639.760.000,	0,	2.639.760.000,	8,43%
Belanja Tunjangan Umum PNS	624.865.000,00	1.670.000,00	623.195.000,00	596.140.000,	555.100,	595.584.900,	4,43%
Belanja Gaji pokok PPPK	1.984.358.276,00	0	1.984.358.276,00	633.669.600,	0,	633.669.600,	68,07%
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	50.176,00	4.400,00	45.776,00	13.320,	0,	13.320,	70,90%
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	112.316.691,00	0	112.316.691,00	16.222.720,	0,	16.222.720,	85,56%
Belanja Tunjangan Anak PPPK	26.466.106,00	0	26.466.106,00	1.430.056,	0,	1.430.056,	94,60%
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	107.658.666,00	0	107.658.666,00	85.270.000,	0,	85.270.000,	20,80%
Belanja Tunjangan Beras PPPK	111.967.355,00	0	111.967.355,00	20.784.540,	0,	20.784.540,	81,44%
Belanja Uang Makan PPPK	245.964.000,00	0	245.964.000,00	90.752.550,	0,	90.752.550,	63,10%
Belanja Tunjangan Umum PPPK	76.410.000,00	0	76.410.000,00	0,	0,	0,	100,00%
Belanja Uang Lembur	32.511.000,00	0	32.511.000,00	101.149.000,	0	101.149.000,	-211,12%
Jumlah Belanja Pegawai	43.982.409.978,	34.699.489,	43.947.710.489,	41.693.911.251,	8.688.712,	41.685.222.539,	5,16%

B.4 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.191.944.156.496,00 dan Rp3.055.453.693.925,00.

Adapun realisasi belanja barang berdasarkan pagu Pegawai Ta. 2025 sebagai berikut :

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN
			JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6=4+5	7=4/3
52	BELANJA BARANG					
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4.627.054.000,	4.341.861.450,	0,	4.341.861.450,	93,84
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	352.450.000,	349.361.880,	0,	349.361.880,	99,12
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	53.952.000,	41.535.052,	0,	41.535.052,	76,99
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3.724.044.000,	3.624.756.000,	265.500,	3.624.490.500,	97,33
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	156.494.000,	146.565.700,	0,	146.565.700,	93,66
521211	Belanja Bahan	16.702.560.000,	15.959.694.973,	7.391.000,	15.952.303.973,	95,51
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	13.426.390.000,	13.389.680.000,	52.900.000,	13.336.780.000,	99,33
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.711.311.000,	1.665.639.992,	0,	1.665.639.992,	97,33
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.072.879.000,	1.046.531.563,	0,	1.046.531.563,	97,54
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	424.867.000,	424.513.747,	0,	424.513.747,	99,92
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	482.016.000,	480.843.675,	0,	480.843.675,	99,76
522111	Belanja Langganan Listrik	3.332.680.000,	3.273.529.818,	0,	3.273.529.818,	98,23
522112	Belanja Langganan Telepon	232.108.000,	213.451.406,	0,	213.451.406,	91,96
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	439.636.000,	430.919.487,	0,	430.919.487,	98,02
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	0,	0,	0,	0,	0
522131	Belanja Jasa Konsultan	150.000.000,	131.901.300,	0,	131.901.300,	87,93
522141	Belanja Sewa	10.136.480.000,	9.366.852.757,	0,	9.366.852.757,	92,41
522151	Belanja Jasa Profesi	1.356.631.000,	999.240.000,	4.770.000,	994.470.000,	73,3
522191	Belanja Jasa Lainnya	14.157.729.000,	14.070.572.578,	0,	14.070.572.578,	99,38
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.043.750.000,	3.976.601.794,	6.250.101,	3.970.351.693,	98,18
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.782.400.000,	4.479.354.006,	2.700.000,	4.476.654.006,	93,61
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	206.939.000,	175.007.081,	0,	175.007.081,	84,57
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	102.388.096.000,	101.008.199.975,	123.930.236,	100.884.269.739,	98,53
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.497.154.000,	10.917.443.000,	17.124.000,	10.900.319.000,	94,81
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	577.832.000,	506.257.652,	1.325.000,	504.932.652,	87,38
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.386.447.000,	6.865.892.999,	15.729.897,	6.850.163.102,	92,74
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri					
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	96.200.000,	96.159.410,	0,	96.159.410,	99,96
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	1.257.472.143.000,	1.255.250.946.398,	6.550.000,	1.255.244.396.398,	99,82
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	2.103.976.946.000,	1.728.755.380.744,	0,	1.728.755.380.744,	82,17
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	9.976.100.000,	9.976.100.000,	0,	9.976.100.000,	100
526313	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	240.000.000,	218.297.793,	0,	218.297.793,	90,96
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	Rp 3.575.183.288.000	Rp 3.192.183.092.230	Rp238.935.734	Rp 3.191.944.156.496	89,26%

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 4,47% dibandingkan per 31 Desember 2024.

Rincian perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 ada pada **Tabel B.9**.

Tabel B.9 Rincian Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2025			31 Desember 2024			NAIK (TURUN) %
	Realisasi Bruto	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto	Realisasi Bruto	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto	
Belanja Barang Operasional	8.504.080.082,	265.500,	8.503.814.582,	14.169.258.438	7.900.000	14.161.358.438	(39,98)
Belanja Barang Non Operasional	31.015.014.965,	60.291.000,	30.954.723.965,	87.083.974.310	11.856.820	87.072.117.490	(64,38)
Belanja Barang Persediaan	1.951.888.985,	0,	1.951.888.985,	4.637.757.460	-	4.637.757.460	(57,91)
Belanja Jasa	28.486.467.346,	4.770.000,	28.481.697.346,	30.283.024.305	6.060.000	30.276.964.305	(5,93)
Belanja Pemeliharaan	8.630.962.881,	8.950.101,	8.622.012.780,	7.727.817.980	-	7.727.817.980	11,69
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	119.297.793.626,	158.109.133,	119.139.684.493,	184.756.574.993	464.641.557	184.291.933.436	(35,43)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	96.159.410,	0,	96.159.410,	1.142.425.022	116.827.966	1.025.597.056	(91,58)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	1.255.250.946.398,	6.550.000,	1.255.244.396.398,	580.468.520.470	-	580.468.520.470	116,25
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan	0,	0,	0,	94.799.000	-	94.799.000	(100,00)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada	1.738.949.778.537,	0,	1.738.949.778.537,	2.146.037.506.290	340.678.000	2.145.696.828.290	(18,97)
JUMLAH	3.192.183.092.230	238.935.734	3.191.944.156.496	3.056.401.658.268,00	947.964.343,00	3.055.453.693.925,00	4,47

Berdasarkan **Tabel B.9** realisasi belanja barang Non Bantuan Pemerintah terbesar per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

AKUN	BELANJA	NILAI BRUTO
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4.341.861.450,
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	349.361.880,
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	41.535.052,
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3.624.756.000,
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	146.565.700,
521211	Belanja Bahan	15.959.694.973,
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	13.389.680.000,
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.665.639.992,
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.046.531.563,
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	424.513.747,
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	480.843.675,
522111	Belanja Langganan Listrik	3.273.529.818,
522112	Belanja Langganan Telepon	213.451.406,
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	430.919.487,
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	0,
522131	Belanja Jasa Konsultan	131.901.300,
522141	Belanja Sewa	9.366.852.757,
522151	Belanja Jasa Profesi	999.240.000,
522191	Belanja Jasa Lainnya	14.070.572.578,
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.976.601.794,
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.479.354.006,
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	175.007.081,
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	101.008.199.975,
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.917.443.000,
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	506.257.652,
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.865.892.999,
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	96.159.410,
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	1.255.250.946.398,
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	1.728.755.380.744,
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	9.976.100.000,
526313	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	218.297.793,
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52		3.192.183.092.230,
Pengembalian Belanja		238.935.734,
Netto		3.191.944.156.496

BELANJA BANTUAN PEMERINTAH

Realisasi belanja bantuan pemerintah (526) terdiri dari bentuk barang senilai Rp1.728.973.678.537,00,- atau 51,28% dan transfer uang Rp1.265.227.046.398,00,- atau 37,52% dari total pagu banpem Rp3.371.665.189.000,00,-.

No	AKUN	BELANJA	NILAI BRUTO
1	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	1.255.250.946.398,
2	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	1.728.755.380.744,
3	526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	9.976.100.000,
4	526313	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	218.297.793,
Jumlah			2.994.200.724.935,
Pengembalian Belanja			6.550.000,
Netto			2.994.194.174.935,000

B.5 BELANJA MODAL

Adapun Realisasi Belanja Modal berdasarkan Pagu anggaran Ta. 2025 sebagai berikut :

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN
			JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6=4+5	7=4/3
53	BELANJA MODAL					
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.370.641.000,	5.364.078.444,	0,	5.364.078.444,	99,88%
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	645.894.000,	631.036.665,	0,	631.036.665,	97,70%
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	109.904.000,	0,	0,	0,	0,00%
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	48.000.000,	47.620.000,	0,	47.620.000,	99,21%
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2.160.507.000,	2.155.653.000,	0,	2.155.653.000,	99,78%
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	287.134.000,	285.755.000,	0,	285.755.000,	99,52%
534121	Belanja Modal Irigasi	358.630.000,	355.150.000,	0,	355.150.000,	99,03%
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	Rp 8.980.710.000	Rp 8.839.293.109	Rp -	Rp 8.839.293.109	98,43%

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.839.293.109,00 dan Rp2.246.009.365,00

Tabel B.11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	Realisasi Bruto per 31 Desember 2025	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto per 31 Desember 2025	Realisasi per 31 Desember 2024	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto per 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.364.078.444,	0,	5.364.078.444,	1.588.896.865,	0,	1.588.896.865,	237,60%
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	631.036.665,	0,	631.036.665,	301.622.000,	0,	301.622.000,	109,21%
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	0,	0,	0,				0,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.620.000,	0,	47.620.000,	155.563.000,	0,	155.563.000,	-69,39%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2.155.653.000,	0,	2.155.653.000,	0,	0,	0,	100,00%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	285.755.000,	0,	285.755.000,				100,00%
Belanja Modal Irigasi	355.150.000,	0,	355.150.000,				100,00%
Belanja Modal Lainnya	0,	0,	0,	199.927.500,	0,	199.927.500,	-100,00%
Jumlah Belanja	8.839.293.109	-	8.839.293.109	2.246.009.365	-	2.246.009.365	75%

Satker Ditjen Tanaman Pangan memiliki Belanja Modal : Kantor Pusat, BBPPMBTPH dan BBPOPT.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin berupa pembelian furniture Kantor, Alat Pengolah data (laptop) dan lain-lain.

Belanja penambahan nilai pada peralatan dan mesin berupa uprage/perbaikan dan renovasi gedung.

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan lanjutan pembangunan Gedung Kantor Direktorat Perlindungan termasuk belanja modal perencanaan dan pengawasan.

B.5.1 BELANJA MODAL TANAH

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp.0,00.

Tabel B.12 Perbandingan Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	Realisasi Bruto per 31 Desember 2025	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto per 31 Desember 2025	Realisasi per 31 Desember 2024	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto per 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Pembebasan Tanah	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0%
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0%
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0%
Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0%
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0%
Jumlah Belanja	-	-	-	-	-	-	-

B.5.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.995.115.109,00 dan Rp1.890.518.865,00.

Tabel B.13 Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	Realisasi Bruto per 31 Desember 2025	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto per 31 Desember 2025	Realisasi per 31 Desember 2024	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto per 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.364.078.444,	0,	5.364.078.444,	1.588.896.865,	0,	1.588.896.865,	237,60
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	631.036.665,	0,	631.036.665,	301.622.000,	0,	301.622.000,	109,21
Jumlah Belanja	5.995.115.109	-	5.995.115.109	1.890.518.865	-	1.890.518.865	217,11

B.5.3 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.203.273.000,00 dan Rp155.563.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 terdapat pada Satker Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Adapun realisasi per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar (1316,32%) dibandingkan per 31 Desember 2023.

Tabel B.14 Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	Realisasi Bruto per 31 Desember 2025	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto per 31 Desember 2025	Realisasi per 31 Desember 2024	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto per 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.620.000,	0,	47.620.000,	155.563.000,	0,	155.563.000,	-69,39%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2.155.653.000,	0,	2.155.653.000,	0,	0,	0,	100,00%
Jumlah Belanja	2.203.273.000	-	2.203.273.000	155.563.000	-	155.563.000	1316,32%

BELANJA MODAL JALAN, JEMBATAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp355.150.000,00 dan Rp0,00.

Tabel 20. Perbandingan Belanja Modal Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	Realisasi Bruto per 31 Desember 2025	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto per 31 Desember 2025	Realisasi Bruto per 31 Desember 2024	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto per 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	285.755.000,	0,	285.755.000,				100,00%
Belanja Modal Irigasi	355.150.000,	0,	355.150.000,				100,00%
Jumlah Belanja	355.150.000	-	355.150.000	-	-	-	100,00%

B.5.4 BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp199.927.500,00. Dibandingkan tahun 2024, belanja modal lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (100,00%).

Tabel 21. Perbandingan Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	Realisasi Bruto per 31 Desember 2025	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto per 31 Desember 2025	Realisasi per 31 Desember 2024	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto per 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	199.927.500	-	199.927.500	- 100,00
Jumlah Belanja	-	-	-	199.927.500	-	199.927.500	- 100,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Nilai
111611 Kas di Bendahara Pengeluaran	0
111613 Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0
J U M L A H	0

Adapun saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp50.000.000,00. dengan rincian seperti pada **Tabel C.1**.

Tabel C.1 Perbandingan Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Akun	31 Desember 2025	31 Des 2024	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	111611	-	50.000.000	-50.000.000	∞
2	111613	-	-	-	-
	Total	-	50.000.000	- 50.000.000	-100,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada 31 Desember 2024 telah disetorkan ke Kas Negara seperti rincian dibawah ini:

Satker	Tgl Setor	Nilai	NTPN
339086. Dinas Pertanian Provinsi Papua Barat	19 Maret 2025	25.000.000	A0DC5397D0PFE28I
	27 Maret 2025	25.000.000	7E968522CM0U4FLM
J U M L A H		50.000.000	

C.1.1. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah seluruh uang tunai atau saldo rekening bank yang dikelola oleh bendahara penerimaan, berasal dari pendapatan negara/daerah, dan belum disetorkan ke rekening kas umum. Kas ini merupakan aset yang dipertanggungjawabkan untuk pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 senilai Rp63.675.107,00 dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Nilai
111711 Kas di Bendahara Penerimaan	63.675.107
J U M L A H	63.675.107

Kas di bendahara penerimaan senilai Rp63.675.107,00 terdiri dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya sebesar Rp43.895.617,00 dan Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan sebesar Rp19.779.490,00 yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum disetorkan milik satker Dinas Provinsi Sulawesi Selatan Satker 199077.

C.2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp50.309.650,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Adapun perbandingan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji pada **Tabel C.3**.

Tabel C.3 Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	KODE	Satker	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun) %
1	289073	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	-	-	-	-
2	'039092	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH	Rp 50.309.650	-	50.309.650	100%
		Total	50.309.650	-	50.309.650	100,00%

Kas Lainnya dan Setara Kas senilai Rp50.309.650,00 pada 31 Desember 2025 merupakan Setoran Lelang Mobil Tanaman Pangan Pada bulan Oktober 2025 milik Provinsi Jawa Tengah Yang disetor Pada Januari 2026. Dengan NTPN ABAA97QLVBBA6IKI Tanggal setor 09 Januari 2026 berupa Pelunasan kewajiban pembayaran lelang berupa DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH-1 UNIT MOBIL MINI BUS SUZUKI GC415V-APV STD Tanggal 23 Oktober 2025.

C.3.1 BELANJA DIBAYAR DIMUKA (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp218.000.000,00 dan Rp220.000.000,00. Belanja Dibayar Dimuka merupakan Beban bantuan pemerintah transfer uang yang diserahkan ke masyarakat, dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2023 terdapat bantuan transfer uang yang belum dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp1.619.375.520,00. pada satuan kerja Kantor Pusat, sehingga menjadi UJK di TA. 2023. Atas nilai tersebut telah dilakukan penyelesaian pertanggungjawaban dan telah dilakukan upload ke aplikasi BAST Banpem. Hasil review itjen atas pertanggungjawaban tersebut telah sesuai.

Adapun saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2025 yang masih tersisa sebagai berikut:

No	KODE	URAIAN SATKER	JUMLAH
1	238251	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	218.000.000
TOTAL			218.000.000

Untuk Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp. 218.000.000 merupakan UJK atas biaya avtur pesawat tahun 2020 yang belum terselesaikan, Namun sudah dilakukan penyetoran sebanyak dua kali, dengan angsuran pertama senilai Rp1.000.000,00 NTPN

64C843CIFTEO9DHR tanggal 24 April 2025 dan angsuran kedua senilai Rp1.000.000,00 NTPN B661155DFJ5FG7K5 tanggal 27 Oktober 2025.

Adapun perbandingan Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji pada Tabel C.3.1

Tabel C.3.1 Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Akun	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun) %
1	114112	218.000.000	220.000.000	- 2.000.000	-0,92%
	Total	Rp 218.000.000	Rp 220.000.000	-Rp 2.000.000	-0,92%

C.4 PIUTANG BUKAN PAJAK

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.090.944.140,00 dan Rp372.002.693,00. Piutang Bukan pajak per 31 Desember 2024 terdiri atas Piutang PNBP dan Piutang Lainnya, yaitu:

Akun	Nilai
115211 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0
115212 Piutang Lainnya	1.090.944.140
J U M L A H	1.090.944.140

Sementara, rincian Piutang Lainnya sebagai berikut:

Satker		Debitur	Piutang	Ket
Kode	Nama			
238251	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	PT. Suita Tour & Travel/ PT. MISG	37.957.817	Temuan BPK atas akuntabilitas penggunaan Anggaran Sewa Pesawat TA 2021
238251	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	PT. Ersu Eastern Aviation	120.000.000	Temuan BPK atas akuntabilitas penggunaan Anggaran Sewa Pesawat TA 2021
J u m l a h			157.957.817	
238251	UJK BPK Atas LK Ta. 2025		27.312.500	Beban Honor Output Kegiatan
			579.211.640	Beban Perjalanan Biasa
			54.123.483	Beban Perjalanan Dinas dalam kota
			7.780.500	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
			67.246.487	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
			176.796.141	Koreksi Lainnya
			9.585.000	Beban Penambah daya Tahan Tubuh
			10.926.608	Beban Bahan
Jumlah UJK			932.982.359	
TOTAL PIUTANG LAINNYA			1.090.940.176	

Adapun perbandingan Piutang Bukan Pajak Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tampak pada **Tabel C.4**.

Tabel C.4 Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Satker	31 Des 2024	Tambah	Kurang	31 Des 2025
1	238251 Ditjen Tanaman Pangan	157.957.817	932.982.259	0	1.090.940.176
	Total	157.957.817	932.982.259		1.090.940.176

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Adapun Piutang PNBPN milik satker kantor pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berupa temuan BPK atas akuntabilitas penggunaan anggaran sewa pesawat TA.2021 pada PT.SUITA Tour and Travel/PT.MISG dan PT.Ersu Eastern Aviation serta UJK BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.

C.5 BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp225.204.318,00 dan Rp252.404.318,00.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Adapun Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 terdiri atas:

Akun	Uraian	Jumlah
115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	-
115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	225,204,318
Jumlah		225,204,318

**Tabel C.5 Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024**

Satker		Debitur	Piutang	Jenis Sumber Piutang
Kode	Nama			
219055	Dinas Pertanian Provinsi Maluku	1. Ir. Abubakar Marasabessy	182.600.000	Kemahalan harga
		2. Husein Salampesy, SP	32.350.000	
		3. Ir. Ngatmin Syahrir	10.254.318	
Jumlah			225.204.318	

**Tabel C.5.1 Perbandingan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Uraian	31 Desember 2024	Tambah	Kurang	31 Desember 2025
1	219055 Distan Prov. Maluku	225.204.318	-	-	225.204.318
	Total	225.204.318	-	-	225.204.318

C.6 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - PIUTANG LANCAR

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(225.204.318,00) dan Rp(225.204.318,00). Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang Lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Pada **Tabel C.7** disajikan Perbandingan Penyisihan Piutang Bukan Pajak dan

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Tabel C.6 Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian Satker	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Bagian Lancar TP/TGR			
1	219055 Distan Maluku	(225.204.318,00)	(225.204.318,00)
Jumlah		(225.204.318,00)	(225.204.318,00)
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-225.204.318,00	-225.204.318,00

Adapun rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang PNBPN adalah:

No	Uraian Satker	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Kantor Pusat	Macet	Rp 157.957.817	100%	Rp 157.957.818
Jumlah			Rp 157.957.817		Rp 157.957.818

Sementara rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sebagai berikut:

No.	Uraian Satker	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Distan Prov. Maluku	Macet	Rp 225.204.318	100%	Rp (225.204.318)

Tabel C.6.1 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	%	Nilai
	Jk Pendek	Penyisihan	Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	157.957.817	100%	(157.957.817)
Jumlah	157.957.817		(157.957.817)
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	225.204.318	100%	(225.204.318)
Jumlah	225.204.318		(225.204.318)
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	383.162.135		(383.162.135)

C.7 PERSEDIAAN

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.700.876.143.241,00 dan Rp3.560.191.517,00.

Saldo Persediaan terdiri dari Barang Konsumsi, Bahan untuk Pemeliharaan, Suku Cadang, Bahan Baku, Persediaan Lainnya dan Bantuan pemerintah yang diserahkan ke masyarakat (UJK 2023 kegiatan TA 2023).

Berikut ini disajikan saldo persediaan persediaan per tanggal 31 Desember 2025 seperti pada **Tabel C.7.1** di bawah ini.

**Tabel C.7.1 Rincian Saldo Persediaan Per Satker
Per 31 Desember 2025**

No	Kode	Nama Satker	Saldo Persediaan
1	238251	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	Rp 650.096.382
2	249099	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 34.180.000
3	249158	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 680.000
4	259062	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	Rp 97.198.549
5	289073	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	Rp 3.200.000
6	339086	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	Rp 550.000.000
Total Persediaan			Rp 1.335.354.931

Rincian jenis persediaan pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian seperti pada **Tabel C.7.2** di bawah ini.

**Tabel C.7.2 Perbandingan Rincian Jenis Persediaan per
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun) %
1	Barang Konsumsi	113.884.765,	88.100.419,	25.784.346	29,27
2	Bahan untuk Pemeliharaan	831.935,	1.343.550,	- 511.615	-38,08
3	Suku Cadang	-	450.000,	- 450.000	-100,00
4	Peralatan dan Mesin ke Masy	0,	-	-	100,00
5	Barang Persed. Lain ke Masy	553.200.000,	2.623.937.000,	- 2.070.737.000	-78,92
6	Bahan Baku	561.625.151,	799.731.043,	- 238.105.892	-29,77
7	Persediaan Lainnya	105.813.080,	46.629.505,	59.183.575	126,92
	Total	1.335.354.931	3.560.191.517	- 2.224.836.586	- 62,49

Rincian jenis persediaan pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian seperti pada Tabel C.7.2 di bawah ini.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Semester II Tahun 2025 (Audited)

AKUN NERACA		SALDO AWAL Per 1 Januari 2025	MUTASI		SALDO AKHIR Per 31 Desember 2025
Kode	Uraian		MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	
117111	Barang Konsumsi	Rp 88.100.419	Rp 849.027.800	Rp 823.243.454	Rp 113.884.765
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp 1.343.550	Rp 344.066.205	Rp 344.577.820	Rp 831.935
117114	Suku Cadang	Rp 450.000	Rp 56.373.834	Rp 56.823.834	Rp -
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	Rp 2.623.937.000	Rp 1.772.358.658.346	Rp 1.771.805.458.346.000	Rp 553.200.000
117129	Persediaan Dalam Proses	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
117131	Bahan Baku	Rp 799.731.043	Rp 509.704.307	Rp 747.810.199	Rp 561.625.151
117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
117199	Persediaan Lainnya	Rp 46.629.505	Rp 382.852.450	Rp 323.668.875	Rp 105.813.080
JUMLAH		Rp 3.560.191.517	Rp 1.774.500.682.942	Rp 1.771.807.754.470.180	Rp 1.335.354.931

PIUTANG JANGKA PANJANG

C.8 TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp2.076.167.350,00 dan Rp4.001.956.160,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara maupun pihak ketiga untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan TP/TGR lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Kode	Satker	Nilai (Rp)		Keterangan
079124	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara - TP	Rp	468.624.850	Dana Banpem tahun 2018 yang masih di rekening Kelompo Tani
159107	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan - TP	Rp	1.164.920.000	Dana Banpem tahun 2018 yang masih di rekening Kelompo Tani
238251	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Rp	69.650.000	Sisa dana Banpem di Rekening Kelompok Tani, Kelebihan pembayaran dan kemahalan harga
239071	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat - DK	Rp	2.566.000	TP/TGR kendaraan yang hilang
249158	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur - TP	Rp 169.906.500	Rp 129.787.500	Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan
			Rp 40.119.000	Pencairan dana kegiatan UPO tahun 2019 tidak sesuai peruntukannya
299336	Dinas Pertanian Prov. Banten (TP)	Rp	200.500.000	Kegiatan movev yang tidak dilaksanakan TA 2004
Jumlah		Rp	2.076.167.350	

Adapun perbandingan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dapat dilihat pada **Tabel C.10**.

Tabel C.8 Rincian Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Satker	31 Desember 2024	Tambah	Kurang	31 Desember 2025
1	079124 Dinas TPH Prov. Sumatera Utara	468.624.850		Rp -	468.624.850
2	159107 Dinas TPH Prov. Kalimantan Selatan	1.167.969.382		Rp 3.049.382	1.164.920.000
3	238251 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Kab Pohuwato)	69.650.000		Rp -	69.650.000
4	239071 Distan TPH Prov. NTB	3.566.000		Rp 1.000.000	2.566.000
5	249158 Distan Prov. NTT	169.906.500		Rp -	169.906.500
6	299336 Dinas Pertanian Prov. Banten	202.500.000		Rp 2.000.000	200.500.000
7	299380 Dinas Pertanian Prov. Banten	1.919.739.428		Rp 1.919.739.428	-
	Jumlah	4.001.956.160	-	Rp 1.925.788.810	2.076.167.350

C.9 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – PIUTANG JANGKA PANJANG

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(1.834.231.605) dan Rp(3.372.806.129,00). Penyisihan piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing- masing piutang.

Tabel C.9 Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2025

No	Satker	Wilayah	Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	079124	Dinas TPH Prov. Sumatera Utara	Macet	468.624.850	100,0%	468.624.850
2	159107	Dinas TPH Prov. Kalimantan Selatan	Macet	1.164.920.000	100,0%	1.164.934.000
3	238251	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Kab Pohuwato)	Macet	69.650.000	100,0%	69.650.000
4	239071	Dinas Pertanian TPH Provinsi Nusa Tenggara Barat	Macet	2.566.000	0,5%	32.160
5	249158	Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Macet	169.906.500	76,5%	129.988.095
6	299336	Dinas Pertanian Prov. Banten	Macet	200.500.000	0,5%	1.002.500
	Jumlah			2.076.167.350		1.834.231.605

C.10 PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.009.199.801,00 dan Rp6.344.044.599,00. Rincian Piutang

Jangka Panjang Lainnya lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NILAI (Rp)	Jenis Sumber Piutang
1	018.03.020072	Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan	Rp 98.352.836	Kelebihan pembayaran kepada PT. Alfa Kreasi Utama atass Kekurangan volume pekerjaan
2	018.03.029159	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	Rp 2.571.798.777	Penyaluran benih jagung tanpa sertifikat
3	018.03.059178	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	Rp 556.913.452	Kelebihan pembayaran ongkos kirim pengadaan benih padi dan jagung TA. 2020
4	018.03.119129	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	Rp 99.900.000	Bantuan benih padi tidak memenuhi mutu dan kualitas
5	018.03.238251	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Rp 241.594.126	214.044.876 Denda keterlambatan Pekerjaan Pemerintah.
				27.200.000 Selisih harga pengadaan benih kedelai
				349.250 Kelebihan pembayaran dan Kemahalan Harga
6	018.03.239126	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp 2.283.783	2.283.783 Kelebihan pembayaran Kegiatan Pembangunan Rumah Dryer
7	018.03.249158	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp 4.550.000	4.400.000 Pertanggungjawaban anggaran tidak sesuai RUK UPH
				150.000 Kekurangan pemotongan PPN ongkos kirim banpem 2021
8	018.03.299380	Dinas Pertanian Provinsi Banten	Rp 3.414.831.327	Penyaluran benih jagung tidak lulus uji sertifikasi
9	018.03.319088	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	Rp 18.975.500	Dana Banpem yang tidak dilaksanakan
TOTAL			Rp 7.009.199.801	

C.11 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – PIUTANG JANGKA PAJANG LAINNYA

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(6.353.336.530,00) dan Rp(5.400.603.279,00). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Panjang Lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing- masing piutang.

**Tabel C.9 Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Jangka Panjang
TA 2025**

No	Satker	Wilayah	Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	020072	Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan	Lancar	Rp 98.352.836	0,50%	-Rp 330.000
2	029159	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	Macet	Rp 2.571.798.777	100%	-Rp 2.571.798.777
3	059178	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	Lancar	Rp 556.913.452	0,50%	-Rp 3.600.267
4	119129	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	Macet	Rp 99.900.000	100%	-Rp 99.900.000
5	238251	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Macet	Rp 241.594.126	100%	-Rp 241.594.126
6	239126	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Macet	Rp 2.283.783	100%	-Rp 2.283.783
7	249158	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Lancar	Rp 4.550.000	0,50%	-Rp 22.750
8	299380	Dinas Pertanian Provinsi Banten	Macet	Rp 3.414.831.327	100%	-Rp 3.414.831.327
9	319088	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	Lancar	Rp 18.975.500	100%	-Rp 18.975.500
Jumlah						-Rp 6.353.336.530

ASET TETAP

Nilai Aset Tetap Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 setelah dikurangi akumulasi penyusutan adalah masing-masing sebesar Rp1.429.185.978.379,00 dan Rp1.444.462.617.069,00. **Tabel C.12** menunjukkan Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Tabel C.12 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Tanah	1.257.696.492.936	1.259.764.248.577	- 2.067.755.641	-0,16%
2	Peralatan dan Mesin	412.391.792.380	424.388.905.282	- 11.997.112.902	-2,83%
3	Gedung dan Bangunan	200.421.765.345	199.223.907.345	1.197.858.000	0,60%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.598.811.162	7.900.731.162	698.080.000	8,84%
5	Aset Tetap Lainnya	2.387.979.575	2.544.696.075	- 156.716.500	-6,16%
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	0,00%
7	Aset Tetap yang Belum Diregister	-	-	-	0,00%
Jumlah		1.881.496.841.398	1.893.822.488.441	-12.325.647.043	-0,65%
Akumulasi Penyusutan		452.310.863.019	449.359.871.372	2.950.991.647	0,66%
Nilai Buku		1.429.185.978.379	1.444.462.617.069	- 15.276.638.690	-1,06%

C.12 TANAH

Tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.257.696.492.936,00 dan Rp1.259.764.248.577,00. Terdapat penurunan nilai aset Tanah, dikarenakan adanya koreksi hasil revaluasi aset dan belanja modal aset tanah. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	1.259.764.248.577
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	- 2.067.755.641
Saldo per 31 Desember 2024	1.259.764.248.577

Terdapat Usulan Jurnal Koreksi atas Tanah Satker BBPOPT Karawang Jawa Barat dikarenakan ada Migrasi dari aplikasi yang bertambah senilai Rp2.067.755.641,00.

C.13 PERALATAN DAN MESIN

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp412.391.792.380,00 dan Rp424.388.905.282,00. Mutasi Aset Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	424.388.905.282,00
Saldo Awal	424.388.905.282,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	5.191.512.294,00
Perolehan Lainnya	9.915.000,00
Reklasifikasi Masuk	272.760.000,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	803.086.665,00
Transfer Masuk	93.143.430,00
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	95.845.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	-272.760.000,00
Hibah Keluar	-4.179.335.582,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-13.818.021.279,00
Transfer Keluar	-93.143.430,00
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-9.915.000,00
Penghapusan	-90.200.000,00
Saldo per 31 Desember 2025	412.391.792.380,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	-390.730.094.230,00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	21.661.698.150,00

Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan atas nilai Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp6.466.778.539,- (Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), berasal dari :

- a. Transaksi Pembelian sebanyak 201 unit senilai Rp.5.191.512.294,- (Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) Berupa Pembelian Intrakomtabel dan Pembelian Berupa Ekstrakomtabel senilai Rp516.150,- (Lima Ratus Enam Belas Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (238251.KP) atas Pengadaan berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 69 unit senilai Rp2.618.629.193 (Dua Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah);
 - Satker Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang Jabar Pengadaan Berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 52 Unit senilai Rp.1.078.727.601,- (Satu Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah);
 - Satker Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan & Hortikultura DKI Jakarta (BBPPMBTPH DKI Jakarta) berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 61 Senilai Rp.1.494.671.650 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
- b. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) senilai Rp.803.086.665,- ('Delapan Ratus Tiga Juta Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berupa peralatan laboratorium di BPMPT senilai Rp631.036.665 (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
 - Satker Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang Jabar berupa Peralatan Laboratorium Microscope dengan Camera sebanyak 1 unit senilai Rp.172.050.000,- (Seratus Tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
- c. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan berupa P.C unit sebanyak 7 unit senilai Rp95.845.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). P.C unit ini digunakan kembali untuk CPNS baru di Direktorat Akabi sesuai surat reklasifikasi BMN nomor 6266/PL.200/C.1/12/2025 tanggal 30 Desember 2025.
- d. Perolehan lainnya berupa 1 unit A.C Split dan 1 unit Dispenser senilai Rp9.915.000 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah). Transaksi ini dilakukan karena kesalahan input kuantitas pada modul komitmen saat register awal. Yang seharusnya pembelian 2 unit A.C Split dan Dispenser namun diinput hanya 1 unit (BAST pembelian nomor I.SET/BA.STP/4273/9/2025).
- e. Reklasifikasi Masuk berupa peralatan dan mesin sebanyak 3 unit senilai Rp.272.760.000,- (Dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian berasal dari:

- Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berupa 1 unit Tablet PC senilai Rp17.760.000 (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sesuai surat keterangan reklasifikasi BMN nomor 6266/PL.200/C.1/12/2025 tanggal 30 Desember 2025.
 - Satuan kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berupa 2 unit minibus (Penumpang 14 orang kebawah) senilai Rp.255.000.000,- (Dua ratus lima lima juta rupiah).
- f. Transfer Masuk dari BB PPMBTPH Cimanggis senilai Rp93.143.430 (Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) berupa:
- 2 unit laptop senilai Rp48.760.080 (Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah) sesuai BAST transfer barang nomor 1224/PL.310/C.9/08/2025 tanggal 25 Agustus 2025.
 - 4 unit mesin absensi dan 1 unit table pc senilai Rp 44.383.350 (Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) sesuai BAST transfer barang nomor 2589/PL.310/C.9/12/2025 tanggal 29 Desember 2025.

Mutasi kurang atas nilai Peralatan dan Mesin sebanyak 7.832 unit senilai Rp.18.676.131.791,- (Delapan belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), berasal dari :

- a. Transaksi Hibah Keluar sebanyak 127 unit senilai Rp.4.179.335.582,- (Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode UAKPB	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
1	018030199238251000KP	Sepeda Motor	18	Unit	239.900.000
2	018030199238251000KP	Kendaraan/Mobil Pengawalan	1	Unit	324.528.521
3	018030199238251000KP	Jeep	2	Unit	525.000.080
4	018030199238251000KP	Kendaraan/Mobil Pengawalan	1	Unit	324.528.521
5	018030199238251000KP	Sepeda Motor	16	Unit	240.020.000
	018030199238251000KP	Jeep	5	Unit	1.400.558.160
6	018030199238251000KP	Sepeda Motor	84	Unit	1.124.800.300
J U M L A H			127		4.179.335.582

Berasal dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (238251.KP) yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah:

- Pemda Prov. Gorontalo c.q. Dinas Pertanian Prov. Gorontalo berupa 1 Unit mobil senilai Rp350.558.000 (BAST no. 30/PL.10/C/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024).
- Pemda Prov. Jawa Timur c.q. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jawa Timur berupa 5 unit mobil senilai Rp1.374.528.681 (BAST no. 01/PL.10/C/1/2025 tanggal 10 januari 2025).
- Pemda Prov. Maluku Utara c.q. Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara berupa 4 unit sepeda motor senilai Rp52.040.000 (BAST no. 36/PL.10/C/12/2024 tanggal 05 Desember 2024).
- Pemda Kab. Bekasi c.q. Dinas Pertanian Kab. Bekasi 3 unit sepeda motor senilai Rp66.990.000 (BAST no. 11/PL.130/C/02/2025 tanggal 03 Februari 2025).

- Pemda Prov. Kalimantan Selatan c.q. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kalimantan Selatan berupa 3 unit mobil Rp849.528.601 dan 18 unit sepeda motor senilai Rp239.900.000 (BAST no. 15/PL.130/C/03/2025 tanggal 17 Maret 2025).
 - Pemda Prov. Bengkulu c.q. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Prov. Bengkulu berupa 9 unit sepeda motor senilai Rp120.990.000 (BAST no. 13/PL.130/C/03/2025 tanggal 17 Maret 2025).
 - Pemda Kota Solok c.q. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok berupa 2 unit sepeda motor senilai Rp26.260.300 (SK penghapusan no. 396/Kpts/PL.320/6/2017 tanggal 20 Juni 2017).
 - Pemda Prov. Sumatera Utara c.q. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumatera Utara berupa 82 unit sepeda motor senilai Rp1.098.540.000 (BAST no. 141/PL.130/C/07/2025 tanggal 24 Juli 2025).
- b. Transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan sebanyak 7.554 Unit senilai Rp.14.010.077.779,- (Empat belas Milyar Sepuluh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. Berasal dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (238251.KP) senilai Rp.5.997.570.032,- sebanyak 97 unit. Dilakukan penghentian dari penggunaan karena kondisi rusak berat dan sedang dalam proses penghapusan;
 2. Berasal dari Kantor Daerah BBPPMBTPH DKI Jakarta senilai Rp.1.422.768.120,- sebanyak 66 unit. Dilakukan penghentian dari penggunaan karena kondisi rusak berat dan sedang dalam proses penghapusan;
 3. Berasal dari Kantor Daerah BBPOPT Karawang Jawa Barat senilai Rp.262.500.040,- sebanyak 1 unit. Dilakukan penghentian dari penggunaan karena kondisi rusak berat dan sudah proses penghapusan;
 4. Berasal dari Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung senilai Rp.598.565.000,- sebanyak 1 unit. Dilakukan penghentian dari penggunaan karena kondisi rusak berat dan sudah proses penghapusan;
 5. Berasal dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara senilai Rp.95.000.000,- sebanyak 1 Unit. Dilakukan penghentian dari penggunaan karena kondisi rusak berat dan sedang dalam proses penghapusan;
 6. Berasal dari Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara (079076.DK) berupa Timbangan Meja Kapasitas 5 Kg sebanyak 28 Buah senilai Rp.5.330.000,- (Lima Juta Tiga Tiga Puluh Ribu Rupiah). Kemudian berupa Sepeda Motor sebanyak 9 Unit Senilai Rp.111.400.000,- (Seratus Sebelas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sudah laksanakan Penjualan Lelang berdasarkan SK Penghapusan Nomor 16/Kpts/PL. 320/A/01/2025 Tanggal 07 Januari 2025;
 7. Berasal dari Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali (229067.DK) berupa Peralatan dan Mesin yang sudah dihentikan penggunaannya dikarenakan kondisi rusak berat sebanyak 76 unit senilai Rp. 357.242.600,-.
- c. Reklasifikasi Keluar berasal dari Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (039092.DK) senilai Rp.255.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) Dikarenakan saat akan mengusulkan Permohonan Penetapan Status Penggunaan (PSP) pada Sistem SIMAN V2 tertolak disebabkan aset tersebut tercatat bukan di Alat kendaraan bermotor tetapi tercatatnya sebagai mobil workshop (barang yang tidak memiliki bukti kepemilikan) sehingga Satker melakukan perubahan Kode Barang yang semula Mobil Workshop menjadi Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode UAKPB	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
1	018030300039092000DK	Mobil Workshop	1	Unit	160.000.000
2	018030300039092000DK	Mobil Workshop	1	Unit	95.000.000
J U M L A H			1		255.000.000

- d. Transfer Keluar berasal dari Kantor Daerah BBPMBTPH DKI Jakarta Senilai Rp.48.760.080,- (Empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan puluh rupiah) sebanyak 2 unit Laptop yang di serahkan kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

No	Kode UAKPB	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai	Keterangan
1	018030100010082000KD	Lap Top	2	Buah	48.760.080	Pada Satker Kantor Pusat Ditjen TP
	Jumlah		2	Buah	48.760.080	

Adapun rincian mutasi Peralatan dan Mesin dari belanja modal pada TA 2025 dapat dilihat pada **Tabel C.14**.

Tabel C.14 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal

Belanja Aset Peralatan dan Mesin :	
Belanja Peralatan dan Mesin	5.995.115.109,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.364.078.444,00
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	631.036.665,00
Mutasi :	
Pembelian	5.191.512.294,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	803.086.665,00
Total Mutasi Aset	5.994.598.959,00
Selisih	516.150,00
Penjelasan Selisih :	
Pembelian Ekstrakomptabel	516.150,00

C.14 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp200.421.765.345,00. dan Rp199.223.907.345,00. Mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	199.223.907.345,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	688.750.000,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	1.514.523.000,00
Reklasifikasi Masuk	280.509.000,00
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	15.988.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	715.254.000,00
Perolehan Lainnya	44.045.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	-280.509.000,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-930.183.000,00
Koreksi Pencatatan	-688.750.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-168.260.000,00
Saldo per 31 Desember 2025	200.415.274.345,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-58.418.110.435,00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	141.997.163.910,00

Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan atas nilai Gedung dan Bangunan pada periode per 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut :

Mutasi Tambah atas nilai Gedung dan Bangunan senilai Rp. 3.259.069.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah), berasal dari :

- a. Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, pada transaksi :
 1. Pembelian senilai berupa rumah negara sebanyak 3 unit dengan nilai Rp688.750.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Transaksi ini adalah kesalahan pencatatan karena modul komitmen salah kode barang saat register awal, sehingga transaksi ini akan di koreksi dengan menu koreksi pencatatan pada aplikasi sakti. Seharusnya nilai Rp688.750.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) menjadi transaksi penambahan nilai rumah negara yang sudah ada.
 2. Perolehan lainnya berupa 1 unit rumah yang berada di Rangkapan Jaya Depok dicatat sebagai rumah negara golongan II tipe D permanen dengan nilai Rp44.045.000 (Empat Puluh Empat Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), sesuai dengan surat nomor 3642/PW.150/C.1/09/2025 tanggal 01 Agustus 2025.
 3. Pengembangan nilai aset untuk 10 unit rumah negara golongan II di Rangkapan Jaya Depok senilai Rp1.514.523.000 (Satu Miliar Lima ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 4. Koreksi pencatatan nilai bertambah untuk 3 unit rumah negara golongan II di Rangkapan Jaya senilai Rp688.750.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 unit pos jaga kompleks rumah negara Rangkapan Jaya senilai Rp26.504.000 (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah).
 5. Reklasifikasi masuk berupa bangunan kantin senilai Rp280.509.000 sesuai dengan surat reklasifikasi BMN no. 6286/PL.200/C.1/12/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- b. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung pada transaksi Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp. 15.988.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Mutasi Kurang atas nilai Gedung dan Bangunan senilai Rp. 2.067.702.000,- (Dua Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah), berasal dari :

- a. Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, pada transaksi :
 1. Koreksi pencatatan nilai berkurang senilai Rp168.260.000 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), karena seharusnya nilai tersebut adalah transaksi pengembangan nilai aset untuk 1 unit pos jaga di kompleks rumah negara Rangkapan Jaya senilai Rp26.504.000 (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah) dan jalan khusus kompleks senilai Rp141.756.000 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).
 2. Koreksi pencatatan berupa 3 unit rumah negara golongan I senilai Rp688.750.000 Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dikoreksi karena kesalahan input pada modul komitmen. Seharusnya nilai ini adalah untuk pengembangan nilai aset rumah negara golongan II.

Reklasifikasi keluar berupa bangunan gedung tempat olahraga lainnya senilai Rp280.509.000 sesuai dengan surat reklasifikasi BMN no. 6286/PL.200/C.1/12/2025 tanggal 31 Desember 2025.

- b. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali pada transaksi :

Penghentian Aset dari penggunaan senilai Rp.930.183.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah), berasal dari :

1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara berupa 1 unit Bangunan Gudang Terbuka Permanen senilai Rp. 909.467.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Transaksi ini dilakukan karena BMn dalam kondisi rusak berat dan sedang dalam proses penghapusan.
2. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali sebanyak 1 unit senilai Rp.14.225.000,- (Empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, sedang dilakukan proses penghapusan;
3. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali sebanyak 1 unit senilai Rp.6.491.000,- (Enam juta empat ratus Sembilan puluh satu Rupiah) berupa Bangunan Lantaijemur Semi Permanen sedang dilakukan proses penghapusan.

Adapun rincian mutasi Gedung dan Bangunan dari belanja modal pada TA 2025 dapat dilihat pada **Tabel C.15**.

Tabel C.15 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal

Belanja Aset Gedung dan Bangunan :	
Belanja Gedung dan Bangunan	2.203.273.000
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	47.620.000,
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2.155.653.000,
Mutasi :	
Pembelian	688.750.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	1.514.523.000
Total Mutasi Aset	2.203.273.000
Selisih	-

C.15 JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing - masing sebesar Rp8.598.811.162,00 dan Rp7.900.731.162,00. Terdapat penambahan nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp 75.568.000. Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 7.900.731.162,00
Mutasi tambah:	Rp 910.487.730
- Pembelian	Rp 402.305.000
- Pengembangan Nilai Aset (langsung)	Rp 238.600.000
- Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp 141.756.000
- Perolehan Lainnya	127.826.730
Mutasi kurang:	Rp - 212.407.730
- Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp - 84.581.000
- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp - 127.826.730
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 8.598.811.162
Akumulasi Penyusutan JIJ per 31 Desember 2025	Rp 3.159.658.354
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp 5.439.152.808

Penjelasan mutasi penambahan dan Pengurangan atas nilai Jalan Irigasi Jaringan dalah sebagai berikut :

1. Pembelian senilai Rp47.155.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) berupa jalan khusus kompleks yang berlokasi di kompleks rumah negara Rangkapan Jaya, Depok dan Pembelian/pembuatan saluran drainase senilai Rp355.150.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di kompleks rumah negara di Rangkapan Jaya, Depok.
2. Pengembangan nilai aset (pengaspalan jalan) senilai Rp238.600.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk jalan khusus kompleks yang berlokasi di kompleks rumah negara Rangkapan Jaya, Depok.
3. Koreksi pencatatan nilai bertambah (pemasangan kanstin jalan) senilai Rp141.756.000 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk jalan khusus kompleks yang berlokasi di kompleks rumah negara Rangkapan Jaya, Depok
4. Perolehan lainnya senilai Rp127.826.730 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) berupa kolam penampungan air di kompleks rumah negara di Rangkapan Jaya, Depok.

Mutasi Kurang atas nilai Jalan Irigasi Jaringan senilai Rp. 212.407.730,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah), berasal dari transaksi :

1. Penghentian Aset Dari Penggunaan senilai Rp. 84.581.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah,-) pada Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara. Traksaksi tersebut dilakukan karena BMN dalm proses penghapusan.

2. Koreksi pencatatan nilai berkurang senilai Rp127.826.730 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) untuk saluran drainase di kompleks rumah negara di Rangkapan Jaya, Depok. Nilai tersebut merupakan nilai pembuatan kolam penampungan di kompleks rumah negara di Rangkapan Jaya, Depok.

Adapun rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari belanja modal pada TA 2024 dapat dilihat pada **Tabel C.16**.

Tabel C.16 Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Belanja Modal

Belanja Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan:	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	640.905.000
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	285.755.000,
Belanja Modal Irigasi	355.150.000,
Mutasi :	
Pembelian	402.305.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	238.600.000
Total Mutasi Aset	640.905.000
Selisih	-
Penjelasan Selisih :	

C.16 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.387.979.575,00 dan Rp2.544.696.075,00 tidak terdapat kenaikan ataupun pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya. Mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	2.544.696.075
Mutasi tambah:	Rp	-
- Perolehan Lainnya	Rp	-
- Pembelian	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	156.716.500
- Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	156.716.500
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	2.387.979.575
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp	3.000.000
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	2.384.979.575

Mutasi kurang atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp156.716.500, berasal dari:

1. Terdapat mutasi kurang yang dikarenakan penghentian aset dari penggunaan sebanyak 3 unit Aset Tetap Lainnya dalam renovasi senilai Rp156.716.500 Pada Satker Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali (229067 DK).

Adapun rincian mutasi Aset Tetap Lainnya dari belanja modal pada TA 2025 dapat dilihat pada **Tabel C.16**.

Tabel C.16 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal

Mutasi Terkait Belanja :	
Pembelian INTRA	-
Pembelian EKSTRA	-
Total Mutasi Aset	-
Belanja Perolehan/Pengembangan ATL :	
Belanja Modal JIJ	-
Belanja Modal Lainnya	-
Total Belanja	-
Selisih	-
Penjelasan Selisih :	

C.17 ASET TETAP YANG BELUM DIREGISTER

Aset Tetap yang Belum Diregister dimiliki Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Tetap yang Belum Diregister Pada umumnya akun aset tetap yang belum diregister di Neraca bersaldo disebabkan oleh kondisi seperti berikut ini: Terdapat Kuitansi/BAST yang belum dilakukan pendetilan di Modul Aset Tetap ,Terdapat Kuitansi/BAST yang tanggal Dokumennya berbeda periode dengan tanggal buku pendetilan Aset tetap, Terdapat Kuitansi/BAST yang dibuat namun tidak lanjutkan menjadi SPP dan tidak dihapus

C.18 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(452.319.863.019,00) dan Rp(449.359.871.372,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Tabel C.17**.

Tabel C.17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah	1.257.696.492.936	-	1.257.696.492.936
2.	Peralatan dan Mesin	412.391.792.380	- 390.730.094.230	21.661.698.150
3.	Gedung dan Bangunan	200.421.765.345	- 58.418.110.435	142.003.654.910
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.598.811.162	- 3.159.658.354	5.439.152.808
5.	Aset Tetap Lainnya	2.387.979.575	- 3.000.000	2.384.979.575
Jumlah		1.881.496.841.398	- 452.310.863.019	1.429.185.978.379

ASET LAINNYA**C.19 ASET TAK BERWUJUD**

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.017.057.080,00 dan Rp1.029.859.279,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 tampak pada **Tabel C.18**.

Tabel C.18. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Software	Rp 618.854.580	Rp 631.656.779	Rp - 12.802.199	-2,03
2	Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp 398.202.500	Rp 398.202.500	Rp -	0,00
Jumlah		Rp 1.017.057.080	Rp 1.029.859.279	Rp - 12.802.199	-1,24

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp 1.029.859.279
Mutasi tambah:	Rp -
Pembelian	Rp -
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp -
Mutasi kurang:	Rp - 12.802.199
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp - 12.802.199
Saldo per 31 Desember 2024	Rp 1.017.057.080
Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud	Rp - 603.453.330
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp 413.603.750

Tidak terdapat mutasi tambah atas nilai ASET TAK BERWUJUD pada periode Laporan per 31 Desember 2025.

Mutasi kurang atas nilai ASET TAK BERWUJUD senilai Rp12.802.199,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) pada periode Laporan per 31 Desember 2025, berasal dari :

Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan sebanyak 6 unit Software Komputer senilai Rp12.802.199,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), berasal dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali sebanyak 4 unit dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2 unit. Transaksi tersebut dilakukan karena dalam proses penghapusan.

Adapun rincian mutasi Aset Tak Berwujud dari belanja modal pada TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel C.19 Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud dari Belanja Modal

Belanja Aset ATB:	
Belanja modal lainnya	-
Mutasi :	
Pembelian	-
Penyelesaian pembangunan langsung	-
Pengembangan langsung	-
Total Mutasi Aset	-
Selisih	-
Penjelasan Selisih :	

C.20 DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp277.865.963.135,00 dan Rp310.609.498.491,00. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan pencatatan Belanja/Beban/Aset sehubungan dengan belanja menggunakan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

Pembayaran penyelesaian pekerjaan dengan mekanisme RPATA merupakan perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Pengisian Dana RPATA dilakukan dengan pemindahan kas dari RKUN ke RPATA dengan menggunakan SP2D-Penampungan.

No	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO
1	010082	BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Rp 483.094.200
2	238351	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	Rp 277.382.868.935
TOTAL			Rp 277.865.963.135

C.21 ASET LAIN-LAIN

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp91.275.880.225,00 dan Rp145.938.404.838,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, serta dalam proses penghapusan dari BMN. Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tampak pada **Tabel C.20**.

Tabel C.20 Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
Aset Tetap Henti Guna	Rp 91.218.750.126	Rp 145.890.140.319	Rp (54.671.390.193)	-37,47
Aset Tak Berwujud Henti Guna	Rp 57.130.099	Rp 48.264.519	Rp 8.865.580	18,37
Jumlah	Rp 91.275.880.225	Rp 145.938.404.838	Rp (54.662.524.613)	-19,11

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	145.938.404.838,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (aset berwujud)	14.983.010.779,00
Pencatatan pembatalan barang yang mau dihapuskan	262.500.040,00
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Aset Tak berwujud)	12.802.199,00
Mutasi Kurang	
Pencatatan barang yang mau dihapuskan (Aset Berwujud)	-21.644.204.645,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-111.833.000,00
Penghapusan	-6.085.013.412,00
Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	-42.075.849.955,00
Pencatatan barang yang mau dihapuskan (aset Tak berwujud)	-3.936.619,00
Saldo per 31 Desember 2025	91.275.880.225,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	-82.542.849.340,00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	8.733.030.885,00

C.22 AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(83.203.432.769,00) dan Rp(137.707.292.348,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Tabel C.21**.

Tabel C.21 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software	Rp 618.854.580	Rp 603.453.330	Rp 15.401.250
2	Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp 398.202.500	Rp -	Rp 398.202.500
Jumlah		Rp 1.017.057.080	Rp 603.453.330	Rp 413.603.750
B	Aset Lain-Lain			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	Rp 91.218.750.126	Rp 82.542.849.340	Rp 8.675.900.786
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	Rp 57.130.099	Rp 57.130.099	Rp -
Jumlah		Rp 91.275.880.225	Rp 82.599.979.439	Rp 8.675.900.786
Total		Rp 92.292.937.305	Rp 83.203.432.769	Rp 9.089.504.536

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji sebesar Rp277.774.077.784,00 dan Rp264.298.451.854,00.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada **Tabel C.22**.

Tabel C.22 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
Utang Kepada Pihak Ketiga	277.774.077.784	264.248.451.854	13.525.625.930	5,12
Uang Muka Dari KPPN	0	50.000.000	-50.000.000	-100,00
Jumlah	277.774.077.784	264.298.451.854	13.475.625.930	5,10

C.23 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp277.774.077.784,00 dan Rp264.298.451.854,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, utang kepada pihak ketiga merupakan Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar. Perbandingan dan Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Tabel C.23**

**Tabel C.23 Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Uraian	31 DES 2025	31 DES 2024	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	178.638.000	108.559.000	70.079.000	64,55
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	276.745.877.934,00	263.718.783.854	13.027.094.080	4,94
3	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	533.403.850	421.109.000	112.294.850	26,67
4	Tunggak Bayar	316.158.000	-	316.158.000	100,00
Total		277.774.077.784	264.248.451.854	13.525.625.930	5,12

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025

No	Uraian	31-Des-25
1	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	Rp 178.638.000
	Uang makan PNS Periode Desember 2025	Rp 148.140.000
	Uang makan PPPK Periode Desember 2025	Rp 30.498.000
2	Belanja Barang yang masih harus dibayar	Rp 277.062.035.934
	Belanja Barang dengan mekanisme RPATA	Rp 276.543.093.250
	Beban Listrik Periode Desember 2025	Rp 201.756.523
	Beban Telfon Periode Desember 2025	Rp 1.028.161
	Tunggak Bayar milik satker 238251	Rp 316.158.000
3	Utang kepada pihak ketiga lainnya	Rp 533.403.850
	Belanja Modal dengan mekanisme RPATA atas pembelian alat Lab Achieva Basic Style Console Germinator milik Satker Cimanggis (010082)	Rp 483.094.200
	Setoran Lelang Mobil Tanaman Pangan Pada bulan Oktober 2025 milik Satker Provinsi Jawa Tengah (039092) Yang disetor Pada Januari 2026. Dengan NTPN ABAA97QLVBBA6IKI Tanggal setor 09 Januari 2026 berupa Pelunasan kewajiban pembayaran lelang berupa DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH-1 UNIT MOBIL MINI BUS SUZUKI GC415V-APV STD Tanggal 23 Oktober 2025.	Rp 50.309.650
	Utang Kepada Pihak Ketiga	Rp 277.774.077.784

C.24 UTANG YANG BELUM DITAGIHKAN

Saldo Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Utang yang belum ditagihkan merupakan Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga yang belum diajukan SPM dan SP2D.

C.25 UANG MUKA DARI KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp50.000.000,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.26 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

EKUITAS

C.27 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.441.865.493.293,00 dan Rp1.505.565.483.810,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN BUKAN PAJAK LAINNYA

Saldo Pendapatan Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing - masing sebesar Rp6.794.156.177,00 dan Rp8.162.743.292,00. Dibandingkan tahun 2024, Pendapatan Bukan Pajak Lainnya tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp1.368.587.115,00 atau sebesar 16,77%. Rincian Pendapatan Bukan Pajak Lainnya disajikan pada **Tabel D.1**.

**Tabel D.1 Perbandingan Pendapatan Bukan Pajak Lainnya
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Pendapatan PNBP Lainnya				
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan,	-415.805.500,	-2.493.409.500,	2.077.604.000	(83,32)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-83.567.400,	-9.446.000,	(74.121.400)	784,69
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	-10.808.414,	-6.900.000,	(3.908.414)	56,64
Pendapatan Perizinan Pertanian	-632.900.000,	-531.300.000,	(101.600.000)	19,12
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	-1.792.261.752,	-1.532.582.355,	(259.679.397)	16,94
Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	-291.172.782,	-258.138.024,	(33.034.758)	12,80
Pendapatan Jasa Lainnya	-591.501.000,	-544.108.000,	(47.393.000)	8,71
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-2.976.139.329,	-2.765.021.646,	(211.117.683)	7,64
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,	-21.837.767,	21.837.767	(100,00)
JUMLAH	(6.794.156.177)	(8.162.743.292)	1.368.587.115	(16,77)

Pendapatan di atas merupakan setoran ke Kas Negara atas pelaksanaan kegiatan dari Bulan Januari – Desember 2025. Dari Tabel D.1 dapat dilihat realisasi pendapatan terbesar per 31 Desember 2025 adalah Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah.

Adapun perbandingan Pendapatan Bukan Pajak Lainnya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional disajikan pada **Tabel D.2**.

Tabel D.2 Perbandingan Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Berdasarkan LRA dan LO Per 31 Desember 2025

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan	Rp 415.805.500	415.805.500,	Rp -
Pendapatan dar Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp 492.668.000	492.668.000,	Rp -
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp 83.567.400	83.567.400,	Rp -
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan	Rp 10.808.414	10.808.414,	Rp -
Pendapatan Perizinan Pertanian	Rp 632.900.000	632.900.000,	Rp -
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	Rp 1.748.366.135	1.792.261.752,	-Rp 43.895.617
Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	Rp 271.393.292	291.172.782,	-Rp 19.779.490
Pendapatan Jasa Lainnya	Rp 591.501.000	591.501.000,	Rp -
Pendapatan penyelesaian Ganti kerugian negara terhadap pegawai	Rp 3.000.000		Rp 3.000.000
Pendapatan penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap pihak ketiga	Rp 1.243.884.681		Rp 1.243.884.681
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Rp 2.976.139.329	2.976.139.329,	Rp -
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	Rp 31.357.949	31.357.949,	Rp -
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	Rp 53.708.890.637	7.697.351.737,	Rp 46.011.538.900
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya		44.045.000,	-Rp 44.045.000
Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp -	0,	Rp -
JUMLAH	Rp 62.210.282.337	15.059.578.863,	Rp 47.150.703.474

Pada **Tabel D.2** diatas terdapat perbedaan antara LRA Pendapatan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya di LO sebesar Rp47.150.703.474,00 terdiri dari :

- Selisih Rp43.895.617,00 dan Rp19.779.490,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi atas kurang catat PNBP Ta.2025
- Selisih Rp3.000.000,00 dan Rp1.243.884.681 merupakan setoran piutang mengurangi nilai neraca.
- Selisih Rp46.011.538.900,00 merupakan Pengembalian RPATA Tahun 2024 senilai Rp46.009.538.900,00 dan Storan pengembalian Avtur mengurangi nilai BDD senilai Rp2.000.000,00.
- Selisih Rp44.045.000,00 merupakan pencatatan Rumah Golongan II Tipe D Tahun 2021 yang belum dicatat.

D.2 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp44.017.785.525,00 dan Rp41.793.781.539,00. Rincian Beban Pegawai disajikan pada **Tabel D.3**.

Tabel D.3 Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Beban Gaji Pokok PNS	29.509.113.616,	29.335.887.100,	173.226.516	0,59
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	-8.531.204,	0	(8.531.204)	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	399.978,	412.798,	(12.820)	(3,11)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-1.014,	-13.612,	12.598	(92,55)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	2.069.478.410,	2.092.822.150,	(23.343.740)	(1,12)
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-3.090.394,	0,	(3.090.394)	(100,00)
Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	-1.540.397,	0,	(1.540.397)	(100,00)
Beban Tunj. Struktural PNS	516.805.000,	464.655.000,	52.150.000	11,22
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	-3.250.000,	0,	(3.250.000)	(100,00)
Beban Tunj. Fungsional PNS	3.175.571.000,	3.134.372.000,	41.199.000	1,31
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	-5.850.000,	-8.120.000,	2.270.000	(27,96)
Beban Tunj. PPh PNS	350.088.762,	344.840.863,	5.247.899	1,52
Beban Tunj. Beras PNS	1.522.195.980,	1.515.098.820,	7.097.160	0,47
Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	-651.780,	0,	(651.780)	(100,00)
Beban Uang Makan PNS	2.933.979.000,	2.746.910.000,	187.069.000	6,81
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	-10.110.300,	0,	(10.110.300)	(100,00)
Beban Tunjangan Umum PNS	624.865.000,	596.140.000,	28.725.000	4,82
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-1.670.000,	-555.100,	(1.114.900)	200,85
Beban Gaji Pokok PPPK	1.984.358.276,	633.669.600,	1.350.688.676	213,15
Beban Pembulatan Gaji PPPK	50.176,	13.320,	36.856	276,70
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PPPK	-4.400,	0,	(4.400)	(100,00)
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	112.316.691,	16.222.720,	96.093.971	592,34
Beban Tunjangan Anak PPPK	26.466.106,	1.430.056,	25.036.050	1.750,70
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	107.658.666,	85.270.000,	22.388.666	26,26
Beban Tunjangan Beras PPPK	111.967.355,	20.784.540,	91.182.815	438,70
Beban Uang Makan PPPK	275.053.000,	92.161.550,	182.891.450	198,45
Beban Tunjangan Umum PPPK	76.410.000,	0,	76.410.000	100,00
Beban Uang Lembur	32.511.000,	101.149.000,	(68.638.000)	(67,86)
JUMLAH	44.017.785.525	41.793.781.539	2.224.003.986	5,32

Secara garis besar, beban pegawai per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan dibandingkan periode 31 Desember 2024 sebesar 5,32%. Hal ini disebabkan adanya penambahan jumlah pegawai PPPK.

Terdapat selisih antara Belanja Pegawai (LRA) dengan Beban Pegawai (LO) sebesar (Rp70.075.036,00) disajikan pada **Tabel D.4**.

Tabel D.4 Perbandingan Belanja Pegawai Berdasarkan LRA dan LO Per 31 Desember 2025

URAIAN	Beban Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih (Rp)
Beban Gaji Pokok PNS	29.509.117.580,	29.509.113.616,	3.964
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	-8.531.204,	-8.531.204,	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	399.978,	399.978,	-
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-1.014,	-1.014,	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	2.069.478.410,	2.069.478.410,	-
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-3.090.394,	-3.090.394,	-
Beban Tunj. Anak PNS	623.196.998,	623.196.998,	-
Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	-1.540.397,	-1.540.397,	-
Beban Tunj. Struktural PNS	516.805.000,	516.805.000,	-
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	-3.250.000,	-3.250.000,	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	3.175.571.000,	3.175.571.000,	-
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	-5.850.000,	-5.850.000,	-
Beban Tunj. PPh PNS	350.088.762,	350.088.762,	-
Beban Tunj. Beras PNS	1.522.195.980,	1.522.195.980,	-
Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	-651.780,	-651.780,	-
Beban Uang Makan PNS	2.892.989.000,	2.933.979.000,	(40.990.000)
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	-10.110.300,	-10.110.300,	-
Beban Tunjangan Umum PNS	624.865.000,	624.865.000,	-
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-1.670.000,	-1.670.000,	-
Beban Gaji Pokok PPPK	1.984.358.276,	1.984.358.276,	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	50.176,	50.176,	-
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PPPK	-4.400,	-4.400,	-
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	112.316.691,	112.316.691,	-
Beban Tunjangan Anak PPPK	26.466.106,	26.466.106,	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	107.658.666,	107.658.666,	-
Beban Tunjangan Beras PPPK	111.967.355,	111.967.355,	-
Beban Uang Makan PPPK	245.964.000,	275.053.000,	(29.089.000)
Beban Tunjangan Umum PPPK	76.410.000,	76.410.000,	-
Beban Uang Lembur	32.511.000,	32.511.000,	-
TOTAL	43.947.710.489,	44.017.785.525,	(70.075.036)

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Saldo Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.879.553.914,00 dan Rp15.865.919.181,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel D.5 Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Beban Persediaan konsumsi	818.399.290,	2.779.673.279,	(1.961.273.989)	(70,56)
Beban Persediaan bahan baku	747.810.199,	1.248.218.748,	(500.408.549)	(40,09)
Beban Persediaan Lainnya	313.344.425,	11.838.027.154,	(11.524.682.729)	(97,35)
JUMLAH	1.879.553.914	15.865.919.181	(13.986.365.267)	(88,15)

Dari **Tabel D.5**, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan TA 2024 terdapat penurunan atas beban persediaan karena turunnya pemakaian persediaan lainnya.

**Tabel D.6 Perbandingan Beban Persediaan dengan Pemakaian Barang Persediaan
per 31 Desember 2025**

Uraian	Nilai Beban Persediaan	Pemakaian Barang Persediaan Berdasarkan SIMAKBMN (Rp)	Selisih
Beban Persediaan konsumsi	818.399.290	823.203.370	- 4.804.080
Beban Persediaan pita cukai, material dan leges	-	-	-
Beban Persediaan bahan baku	747.810.199	729.978.050	17.832.149
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/Berjaga-jaga	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	313.344.425	313.344.425	-
JUMLAH	1.879.553.914	1.866.525.845	13.028.069

Pada Tabel D.6 diatas dapat dilihat terdapat selisih pada Beban Persediaan Konsumsi, Beban Persediaan bahan baku dan Beban Persediaan Lainnya. Selisih tersebut dikarenakan adanya kesalahan kode barang pada saat penginputan pada aplikasi SAKTI.

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Saldo Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp67.898.899.356,00 dan Rp133.749.521.406,00.

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Dibandingkan TA 2024, terjadi penurunan atas beban barang dan jasa sebesar (49,20%), adapun kenaikan terbesar terdapat pada Beban Jasa Konsultan. Sementara nilai beban terendah terdapat pada Barang Non Operasional Lainnya.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel D.7 Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Beban Keperluan Perkantoran	4.341.861.450,	6.778.121.637,	(2.436.260.187)	(35,94)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	339.776.880,	177.346.000,	162.430.880	(100,00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	41.535.052,	74.049.271,	(32.514.219)	(43,91)
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-265.500,	-7.900.000,	7.634.500	(96,64)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	3.624.756.000,	6.410.800.000,	(2.786.044.000)	100,00
Beban Barang Operasional Lainnya	146.565.700,	728.941.530,	(582.375.830)	(79,89)
Pengembalian Beban Bahan	-7.391.000,	-752.000,	(6.639.000)	882,85
Beban Bahan	15.948.768.365,	20.274.863.177,	(4.326.094.812)	(21,34)
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	-52.900.000,	0,	(52.900.000)	(100,00)
Beban Honor Output Kegiatan	13.362.367.500,	42.244.335.888,	(28.881.968.388)	(68,37)
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,	-11.104.820,	11.104.820	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.665.639.992,	22.367.522.098,	(20.701.882.106)	(92,55)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	516.150,	0,	516.150	100,00
Beban Langganan Listrik	3.279.556.387,	3.416.133.080,	(136.576.693)	(4,00)
Beban Langganan Telepon	213.396.258,	267.159.776,	(53.763.518)	(20,12)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	430.919.487,	343.215.258,	87.704.229	25,55
Beban Jasa Konsultan	131.901.300,	0,	131.901.300	100,00
Beban Sewa	9.366.852.757,	9.674.209.746,	(307.356.989)	(3,18)
Pengembalian Beban Jasa Profesi	-4.770.000,	-6.060.000,	1.290.000	(21,29)
Beban Jasa Profesi	999.240.000,	4.220.800.000,	(3.221.560.000)	(76,33)
Beban Jasa Lainnya	14.070.572.578,	16.797.840.765,	(2.727.268.187)	(16,24)
TOTAL	67.898.899.356	133.749.521.406	(65.850.622.050)	(49,23)

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Saldo Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp78.848.407.353,00 dan Rp7.964.873.373,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel D.8 Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.976.601.794,	3.366.984.015,	609.617.779	18,11
Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-6.250.101,	0	(6.250.101)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.479.354.006,	4.204.926.925,	274.427.081	6,53
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-2.700.000,	0	(2.700.000)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,	38.620.000,	(38.620.000)	100,00
Beban Pemeliharaan Jaringan	0,	117.287.040,	(117.287.040)	(100,00)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	344.577.820,	57.791.249,	286.786.571	496,25
Beban Persediaan suku cadang	56.823.834,	179.264.144,	(122.440.310)	(68,30)
JUMLAH	8.848.407.353	7.964.873.373	719.187.719	9,03

Pada Tabel D.8 dapat dilihat bahwa dibandingkan tahun 2024, pada tahun 2025 beban pemeliharaan mengalami kenaikan sebesar 9,03% dengan kenaikan terbesar pada beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan.

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Saldo Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp118.527.481.793,00 dan Rp185.493.530.492,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel D.9 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	100.428.988.335,	118.358.527.875,	(17.929.539.540)	(15,15)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	-123.930.236,	-204.497.679,	80.567.443	(39,40)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.863.319.517,	35.897.309.500,	(25.033.989.983)	(69,74)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-17.124.000,	-234.512.800,	217.388.800	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	498.477.152,	1.603.023.653,	(1.104.546.501)	(68,90)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	-1.325.000,	-2.862.288,	1.537.288	(53,71)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.798.646.512,	29.073.713.965,	(22.275.067.453)	(76,62)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-15.729.897,	-22.768.790,	7.038.893	(30,91)
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	96.159.410,	1.142.425.022,	(1.046.265.612)	(91,58)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0,	-116.827.966,		(100,00)
JUMLAH	118.527.481.793	185.493.530.492	(67.082.876.665)	(36,16)

Jika dibandingkan dengan TA 2024, terjadi penurunan atas beban Perjalanan Dinas sebesar (36,16%). Adapun penurunan terbesar pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota.

D.7 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Saldo Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.995.730.094.250,00 dan Rp2.725.054.014.218,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel D.10 Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	6.550.000,	0	6.550.000	100,00
Pengembalian Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan	-6.550.000,	0	(6.550.000)	(100,00)
Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	0	3.789.375.520,	(3.789.375.520)	(100,00)
Beban Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	0	290.353.000,	(290.353.000)	(100,00)
Pengembalian Beban Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan	0	-290.353.000,	290.353.000	(100,00)
Pengembalian Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang	0	-50.325.000,	50.325.000	(100,00)
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	9.976.100.000,	34.962.490.000,	(24.986.390.000)	100,00
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	218.297.793,	170.478.240,	47.819.553	100,00
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau	1.255.244.396.398,	579.046.039.970,	676.198.356.428	116,78
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	1.730.291.300.059,	2.107.135.955.488,	(376.844.655.429)	(17,88)
JUMLAH	2.995.730.094.250	2.725.054.014.218	270.676.080.032	9,93

Jika dibandingkan dengan TA 2024, terdapat kenaikan atas Beban Barang dan Uang Bantuan Pemerintah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar 9,93%, kenaikan terbesar pada Beban persediaan peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat.

D.8 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp21.202.712.062,00 dan Rp24.129.775.733,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel D.11 Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	13.202.023.668,	16.040.234.581,	(2.838.210.913)	(17,69)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.501.712.718,	7.464.559.519,	37.153.199	0,50
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	21.375.550,	138.061.293,	(116.685.743)	(84,52)
Beban Penyusutan Irigasi	126.162.939,	112.945.021,	13.217.918	11,70
Beban Penyusutan Jaringan	41.929.109,	42.179.109,	(250.000)	(0,59)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	295.632.382,	308.843.564,	(13.211.182)	(4,28)
Jumlah penyusutan	21.188.836.366,	24.106.823.087,	-2.917.986.721,	(12,10)
Beban Amortisasi Software	12.767.500,	22.952.646,	(10.185.146)	(44,37)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	1.108.196,	0,	1.108.196	100,00
Jumlah penyusutan	13.875.696,	22.952.646,	-10.185.146,	(44,37)
JUMLAH	21.202.712.062	24.129.775.733	(2.928.171.867)	(12,14)

D.9 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp785.709.339,00) dan Rp1.076.040.809,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel D.12 Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan	% NAIK
			(Penurunan)	(TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	128.065.467,	0	128.065.467	100,00%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	142.134.375,	1.162.126.035,-	1.019.991.660	-87,77%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	-1.055.909.181,	-86.085.226,-	969.823.955	1126,59%
Jumlah	- 785.709.339	1.076.040.809	- 1.861.750.148,00	-173,02%

Jika dibandingkan dengan TA 2024, terdapat penurunan atas beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar (173,02%).

D.10 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel D.13 Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2025	30 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	457.230.798,	(365.820.907,)	823.051.705	(224,99)
Pendapatan Pelepasan Aset	492.668.000,	934.209.498,	(441.541.498)	(47,26)
Beban Pelepasan Aset	35.437.202,	1.300.030.405,	(1.264.593.203)	(97,27)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,	0,	-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,	0,	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,	0,	-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7.761.554.686,	26.507.289.817,	(18.745.735.131)	(70,72)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7.772.754.686,	26.507.289.817,	(18.734.535.131)	(70,68)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	11.200.000,	0,	11.200.000	100,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	8.218.785.484	26.141.468.910	(17.922.683.426)	(68,56)

D.10.1 SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET

Surplus/Defisit Pelepasan Aset terdiri dari pendapatan dan beban pelepasan aset. Surplus Pelepasan Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah defisit sebesar Rp457.230.798,00 dan defisit (Rp365.820.907,00). Surplus Pelepasan Aset per 31 Desember 2025 merupakan selisih antara total Pendapatan Pelepasan Aset sebesar Rp492.668.000,00 dan total Beban Pelepasan Aset sebesar Rp35.437.202,00.

D.10.1.1 PENDAPATAN PELEPASAN ASET

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp492.668.000,00 dan Rp934.209.498,00. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp441.541.498,00 atau (47,26%) dibandingkan Tahun 2024.

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset pada 31 Desember 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel D.14 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	492.668.000,	934.209.498,	(441.541.498)	(47,26)
JUMLAH	492.668.000	934.209.498	(441.541.498)	(47,26)

Tidak terdapat selisih antara realisasi pendapatan pelepasan aset non lancar pada laporan realisasi anggaran (LRA) periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dengan pendapatan pelepasan aset non lancar pada laporan operasional (LO), seperti dapat dilihat pada **Tabel D.15**.

Tabel D.15 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2025

URAIAN	LRA	LO	Selisih	% Naik (TURUN)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	492.668.000,	492.668.000,	-	-
JUMLAH	492.668.000	492.668.000	-	-

D.10.1.2 BEBAN PELEPASAN ASET

Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp35.437.202,00 dan Rp1.300.030.405,00. Beban ini turun sebesar (Rp1.264.593.203,00) atau (97,27%) dibanding Tahun 2024.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang terbentuk dari berkurangnya Aset Non Lancar (Aset Tetap dan Aset Lainnya), karena Satuan Kerja melakukan pelepasan Aset Non Lancar kepada pihak lain, seperti masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak lainnya, maupun karena kondisi aset non lancar tersebut. Pelepasan Aset tersebut dapat berupa

penghapusan, barang hilang, barang rusak berat yang diusulkan dihapus, maupun barang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Perbandingan Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 tampak pada **Tabel D.16**.

Tabel D.16 Perbandingan Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	35.437.202,	1.300.030.405,	(1.264.593.203)	(97,27)
Jumlah	35.437.202	1.300.030.405	(1.264.593.203)	(97,27)

D.10.2. SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp7.761.554.686,00 dan Rp26.507.289.817,00. Nilai tersebut turun sebesar (Rp18.745.735.131,00) atau (70,72%) dibanding Tahun 2024. Surplus Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp7.772.754.686,00 dan Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp11.200.000,00.

D.10.2.1 PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp7.772.754.686,00 dan Rp26.507.289.817,00. Nilai tersebut turun sebesar (Rp18.734.535.131,00) atau (70,68%) dibanding Tahun 2024. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 tampak pada **Tabel D.17**.

Tabel D.17 Perbandingan Pendapatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	-2.630.000,	2.630.000	(100,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	-7.680.000,	7.680.000	(100,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	-103.244.786,	103.244.786	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	-31.357.949,	-925.826,	(30.432.123)	3.287,02
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-7.697.351.737,	-26.270.462.605,	18.573.110.868	(100,00)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-44.045.000,	-122.346.600,	78.301.600	(64,00)
Jumlah	-7.772.754.686,	-26.507.289.817,	18.734.535.131,	(70,68)

Jika Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp349.495.123,00, sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel D.18 Perbandingan Pendapatan Non Operasional Lainnya
Antara LRA dan LO per 31 Desember 2025**

URAIAN	LRA	LO	Kenaikan (Penurunan)	Keterangan
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	-3.000.000,	0,	(3.000.000)	Setoran Piutang
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	-1.243.884.681,	0,	(1.243.884.681)	Setoran Piutang
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	-31.357.949,	-31.357.949,	-	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-53.708.890.637,	-7.697.351.737,	(46.011.538.900)	Pengembalian RPATA tahun 2024
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0,	-44.045.000,	44.045.000	Pencatatan rumah Gol.II Tipe D th2021 yang belum dictata
	(54.987.133.267)	(7.772.754.686)	(47.214.378.581)	

Pada **Tabel D.18** dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan nilai pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya antara LRA dan LO disebabkan adanya setoran Piutan yang mengurangi Neraca, pemnegembalian RPATA Tahun 2024 serta pencatatan atas Rumah Gol II type D Tahun 2021 yang belum dicatat.

D.10.2.2 BEBAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp11.200.000,00 dan Rp0,00. Beban ini naik sebesar Rp11.200.000,00 atau senilai 100,00% dibandingkan tahun 2024. Beban dari Kegiatan non Operasional Lainnya berupa Beban Penyesuaian Nilai Persediaan. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel D.19 Perbandingan Beban Non Operasional Lainnya
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Beban Persediaan Rusak/Usang	11.200.000,	-	11.200.000	100,00
Jumlah	11.200.000	-	11.200.000	0,00%

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Saldo ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.505.565.483.810,00 dan Rp1.536.382.708.942,00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Saldo Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(3.242.306.283.253,00) dan Rp(3.100.823.244.549,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

E.3.1 PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir periode tahun berjalan. Saldo Penyesuaian Nilai Aset periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.2 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp310.169.000,00.

E.3.3 KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

Nilai Koreksi atas Reklasifikasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp0,00.

E.3.4 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Saldo Selisih revaluasi Aset Tetap untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.5 KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(3.092.818.702,00) dan Rp(586.727.096,00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap non revaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

KODE	NMSATKER	31 Desember 2025
020072	BBPOPT KARAWANG JAWA BARAT	Rp2.067.755.641
079076	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. SUMATERA UTARA	Rp 841.957.782
238251	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	Rp 183.105.279
TOTAL		3.092.818.702

KODE SATKER	DESKRIPSI	31 Desember 2025
020072	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	2.067.755.641
079076	Pencatatan Barang yang mau dihapuskan	841.957.782
238251	Koreksi Pencatatan	664.101.280
238251	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	306.001.730
238251	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	- 649.256.001
238251	Jurnal penyesuaian untuk koreksi pencatatan nilai berkurang	- 137.741.730
Total		3.092.818.702

E.3.6 KOREKSI LAIN-LAIN

Saldo Koreksi Lain-lain untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(821.766.319,00) dan Rp2.071.764,00 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	Kode Satker	Satker	31 Desember 2025
Koreksi Lainnya	119129	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. SUMATERA SELATAN	- 98.910.000
Koreksi Lainnya	159107	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV. KALIMANTAN SELATAN	- 14.000
Koreksi Lainnya	238251	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	- 480.083.859
Koreksi Lainnya	269110	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURAN DAN PERKEBUNAN PROV. BENGKULU	- 692.549
Koreksi Lainnya	299380	DINAS PERTANIAN PROV.BANTEN	- 242.242.408
Koreksi Lainnya	319088	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	176.497
Total			- 821.766.319

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Saldo Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.182.520.877.757,00 dan Rp3.070.280.505.749,00. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel E.2. Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.244.731.160.094,	3.099.384.925.829,	4,69%
Diterima dari Entitas Lain	-62.210.282.337,	-35.931.899.963,	73,13%
Transfer Keluar	-93.143.430,	-199.128.000,	-53,22%
Transfer Masuk	93.143.430,	960.000,	9602,44%
Pengesahan Hibah Langsung	0,	7.025.647.883,	-100,00%
TOTAL	3.182.520.877.757	3.070.280.505.749	3,66%

Tahun 2025 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menerima hibah dari Food and Agriculture of the United Nation (FAO) senilai USD 443.336,13 (88,67%) dari total komitmen awal dana proyek sebesar USD 500.000 atau senilai Rp 7.025.547.883,- berupa belanja jasa senilai Rp3.926.795.095,- dan berupa barang-barang senilai Rp3.098.852.788,- dalam kegiatan *Emergency response to locust infestation* di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

E.4.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN), yang mana per 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp3.244.731.160.094,00 sedangkan DDEL sebesar Rp(62.210.282.337,00).

E.4.2 TRANSFER MASUK/ TRANSFER KELUAR

Saldo transfer keluar disajikan sebesar Rp(93.143.430,00) dan transfer masuk sebesar Rp93.143.430,00. Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL. antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Adapun rincian transfer keluar sebagai berikut:

KODE	NMSATKER	RPHREAL
018.03.010082	BBPPMBTPH DKI JAKARTA	(93.143.430,00.)
TOTAL		(93.143.430,00.)

1. Transfer keluar Peralatan dan Mesin milik BBPPMBTPH DKI JAKARTA (Rp93.143.430,00).

Adapun rincian transfer masuk sebagai berikut :

KODE	NMSATKER	RPHREAL
018.03.238251	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	93.143.430,00
TOTAL		93.143.430,00

1. Transfer Masuk berupa Peralatan dan Mesin dari BBPPMBTPH DKI JAKARTA Rp93.143.430,00

E.5 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.441.865.493.293,00 dan Rp1.505.565.483.810,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Persediaan Yang Tidak dikuasai

Persediaan yang tidak dikuasai oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp.136.754.042.950,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

F.2. Tanah Belum Bersertifikat

Terdapat aset tanah milik BBPOPT Karawang Jawa Barat belum bersertifikat terdiri dari 14 NUP Senilai Rp308.184.967,00.

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 11/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 11/05/26 9:09 AM

Halaman : 1

lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	50,000,000	(50,000,000)	(100.00)
Kas di Bendahara Penerimaan	63,675,107	0	63,675,107	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	50,309,650	0	50,309,650	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	218,000,000	220,000,000	(2,000,000)	(0.91)
Piutang Bukan Pajak	1,090,944,140	157,957,817	932,986,323	590.66
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(157,957,817)	(29,892,350)	(128,065,467)	428.42
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	932,986,323	128,065,467	804,920,856	628.52
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	225,204,318	225,204,318	0	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(225,204,318)	(225,204,318)	0	0.00
Persediaan	1,335,354,931	3,560,191,517	(2,224,836,586)	(62.49)
JUMLAH ASET LANCAR	2,600,326,011	3,958,256,984	(1,357,930,973)	(34.31)
ASET TETAP				
Tanah	1,257,696,492,936	1,259,764,248,577	(2,067,755,641)	(0.16)
Peralatan dan Mesin	412,391,792,380	424,388,905,282	(11,997,112,902)	(2.83)
Gedung dan Bangunan	200,421,765,345	199,223,907,345	1,197,858,000	0.60
Jalan, Irigasi dan Jaringan	8,598,811,162	7,900,731,162	698,080,000	8.84
Aset Tetap Lainnya	2,387,979,575	2,544,696,075	(156,716,500)	(6.16)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(452,310,863,019)	(449,359,871,372)	(2,950,991,647)	0.66
JUMLAH ASET TETAP	1,429,185,978,379	1,444,462,617,069	(15,276,638,690)	(1.06)
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	2,076,167,350	4,001,956,160	(1,925,788,810)	(48.12)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(1,834,231,605)	(3,372,806,129)	1,538,574,524	(45.62)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	241,935,745	629,150,031	(387,214,286)	(61.55)
Piutang Jangka Panjang lainnya	7,009,199,801	6,344,044,599	665,155,202	10.48
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(6,353,336,530)	(5,400,603,279)	(952,733,251)	17.64
PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA(NETTO)	655,863,271	943,441,320	(287,578,049)	(30.48)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	897,799,016	1,572,591,351	(674,792,335)	(42.91)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,017,057,080	1,029,859,279	(12,802,199)	(1.24)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	277,865,963,135	310,609,498,491	(32,743,535,356)	(10.54)
Aset Lain-lain	91,275,880,225	145,938,404,838	(54,662,524,613)	(37.46)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(83,203,432,769)	(137,707,292,348)	54,503,859,579	(39.58)
JUMLAH ASET LAINNYA	286,955,467,671	319,870,470,260	(32,915,002,589)	(10.29)
JUMLAH ASET	1,719,639,571,077	1,769,863,935,664	(50,224,364,587)	(2.84)
KEWAJIBAN				

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 11/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 11/05/26 9:09 AM
Halaman : 2

lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	277,774,077,784	264,248,451,854	13,525,625,930	5.12
Uang Muka dari KPPN	0	50,000,000	(50,000,000)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	277,774,077,784	264,298,451,854	13,475,625,930	5.10
JUMLAH KEWAJIBAN	277,774,077,784	264,298,451,854	13,475,625,930	5.10
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,441,865,493,293	1,505,565,483,810	(63,699,990,517)	(4.23)
JUMLAH EKUITAS	1,441,865,493,293	1,505,565,483,810	(63,699,990,517)	(4.23)
JUMLAH EKUITAS	1,441,865,493,293	1,505,565,483,810	(63,699,990,517)	(4.23)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,719,639,571,077	1,769,863,935,664	(50,224,364,587)	(2.84)

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 11/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 11/05/26 9:10 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	63,675,107	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	50,309,650	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	218,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	1,090,944,140	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	225,204,318	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	157,957,817
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	225,204,318
0.0	117111	Barang Konsumsi	113,884,765	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	831,935	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	553,200,000	0
0.0	117131	Bahan Baku	561,625,151	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	105,813,080	0
0.0	131111	Tanah	1,257,696,492,936	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	412,391,792,380	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	200,421,765,345	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	1,498,862,400	0
0.0	134112	Irigasi	5,496,702,791	0
0.0	134113	Jaringan	1,603,245,971	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	1,928,845,750	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	459,133,825	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	390,730,094,230
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	58,418,110,435
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1,092,726,950
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	1,243,331,455
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	823,599,949
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	3,000,000
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	2,076,167,350	0
0.0	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	7,009,199,801	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	1,834,231,605
0.0	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	6,353,336,530
0.0	162151	Software	618,854,580	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	398,202,500	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	277,865,963,135	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	91,218,750,126	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	57,130,099	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	82,542,849,340

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 11/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 11/05/26 9:10 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	603,453,330
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	57,130,099
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	178,638,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	277,062,035,934
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	533,403,850
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,244,731,160,094
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	62,210,282,337	0
0.0	313211	Transfer Keluar	93,143,430	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	93,143,430
0.0	391111	Ekuitas	0	1,505,565,483,810
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3,092,818,702	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	821,766,319	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	415,805,500
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	492,668,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	83,567,400
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	10,808,414
3.0	425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	0	632,900,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	1,792,261,752
3.0	425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	291,172,782
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	591,501,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,976,139,329
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	31,357,949
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,697,351,737
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	44,045,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	29,500,582,412	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	398,964	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	2,066,388,016	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	621,656,601	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	513,555,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3,169,721,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	350,088,762	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,521,544,200	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	2,923,868,700	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	623,195,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	1,984,358,276	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	45,776	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	112,316,691	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 11/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 11/05/26 9:10 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	26,466,106	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	107,658,666	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	111,967,355	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	275,053,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	76,410,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	32,511,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	4,341,861,450	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	339,776,880	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	41,535,052	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	3,624,490,500	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	146,565,700	0
3.0	521211	Beban Bahan	15,941,377,365	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	13,309,467,500	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,665,639,992	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	516,150	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	3,279,556,387	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	213,396,258	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	430,919,487	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	131,901,300	0
3.0	522141	Beban Sewa	9,366,852,757	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	994,470,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	14,070,572,578	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,970,351,693	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,476,654,006	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	100,305,058,099	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,846,195,517	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	497,152,152	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,782,916,615	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	96,159,410	0
3.0	526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	9,976,100,000	0
3.0	526313	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Jasa	218,297,793	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	13,202,023,668	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7,501,712,718	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	21,375,550	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	126,162,939	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	41,929,109	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	12,767,500	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	1,108,196	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 11/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 11/05/26 9:10 AM

Halaman : 4

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
		dalam Operasional Pemerintahan		
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	295,632,382	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	818,399,290	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	344,577,820	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	56,823,834	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1,255,244,396,398	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1,730,291,300,059	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	747,810,199	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	313,344,425	0
3.0	594249	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	128,065,467	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	142,134,375	0
3.0	594991	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	1,055,909,181
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	35,437,202	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	11,200,000	0
		JUMLAH	5,588,364,379,220	5,588,364,379,220

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 11/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 11/05/26 9:11 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,244,731,160,094
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	62,210,282,337	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	415,805,500
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	492,668,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	83,567,400
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	10,808,414
3.0	425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	0	632,900,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	1,748,366,135
3.0	425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	271,393,292
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	591,501,000
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	3,000,000
3.0	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	1,243,884,681
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,976,139,329
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	31,357,949
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	53,708,890,637
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	29,509,117,580	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	399,978	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2,069,478,410	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	623,196,998	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	516,805,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,175,571,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	350,088,762	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,522,195,980	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	2,892,989,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	624,865,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,984,358,276	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	50,176	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	112,316,691	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	26,466,106	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	107,658,666	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	111,967,355	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	245,964,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	76,410,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	32,511,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4,341,861,450	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	349,361,880	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	41,535,052	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 11/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 11/05/26 9:11 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,624,756,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	146,565,700	0
3.0	521211	Belanja Bahan	15,959,694,973	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	13,389,680,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,665,639,992	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,046,531,563	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	424,513,747	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	480,843,675	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	3,273,529,818	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	213,451,406	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	430,919,487	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	131,901,300	0
3.0	522141	Belanja Sewa	9,366,852,757	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	999,240,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	14,070,572,578	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,976,601,794	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,479,354,006	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	175,007,081	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	101,008,199,975	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,917,443,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	506,257,652	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,865,892,999	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	96,159,410	0
3.0	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1,255,250,946,398	0
3.0	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1,728,755,380,744	0
3.0	526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	9,976,100,000	0
3.0	526313	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Jasa	218,297,793	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,364,078,444	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	631,036,665	0
3.0	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	47,620,000	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2,155,653,000	0
3.0	534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	285,755,000	0
3.0	534121	Belanja Modal Irigasi	355,150,000	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	8,531,204
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,014
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	3,090,394
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	1,540,397

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 11/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 11/05/26 9:11 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	3,250,000
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	5,850,000
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	651,780
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	10,110,300
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	1,670,000
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	4,400
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	265,500
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	7,391,000
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	52,900,000
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	4,770,000
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	6,250,101
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	2,700,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	123,930,236
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	17,124,000
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	1,325,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	15,729,897
3.1	526112	Pengembalian Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	6,550,000
JUMLAH			3,307,215,077,654	3,307,215,077,654

Keterangan :

FINAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 11/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 11/05/26 9:07 AM

Halaman : 1

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,794,156,177	8,162,743,292	(1,368,587,115)	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	6,794,156,177	8,162,743,292	(1,368,587,115)	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	6,794,156,177	8,162,743,292	(1,368,587,115)	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	44,017,785,525	41,793,781,539	2,224,003,986	-
Beban Persediaan	1,879,553,914	15,865,919,181	(13,986,365,267)	-
Beban Barang dan Jasa	67,898,899,356	133,749,521,406	(65,850,622,050)	-
Beban Pemeliharaan	8,848,407,353	7,964,873,373	883,533,980	-
Beban Perjalanan Dinas	118,527,481,793	185,493,530,492	(66,966,048,699)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2,995,730,094,250	2,725,054,014,218	270,676,080,032	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 11/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 11/05/26 9:07 AM

Halaman : 2

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	21,202,712,062	24,129,775,733	(2,927,063,671)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(785,709,339)	1,076,040,809	(1,861,750,148)	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	3,257,319,224,914	3,135,127,456,751	122,191,768,163	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,250,525,068,737)	(3,126,964,713,459)	(123,560,355,278)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	457,230,798	(365,820,907)	823,051,705	-
Pendapatan Pelepasan Aset	492,668,000	934,209,498	(441,541,498)	-
Beban Pelepasan Aset	35,437,202	1,300,030,405	(1,264,593,203)	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7,761,554,686	26,507,289,817	(18,745,735,131)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7,772,754,686	26,507,289,817	(18,734,535,131)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	11,200,000	0	11,200,000	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	8,218,785,484	26,141,468,910	(17,922,683,426)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,242,306,283,253)	(3,100,823,244,549)	(141,483,038,704)	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,242,306,283,253)	(3,100,823,244,549)	(141,483,038,704)	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 11/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 11/05/26 9:07 AM

Halaman : 1

lap_lpe_es1_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,505,565,483,810	1,536,382,708,942	(30,817,225,132)	(2.01)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,242,306,283,253)	(3,100,823,244,549)	(141,483,038,704)	4.56
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(3,914,585,021)	(274,486,332)	(3,640,098,689)	1,326.15
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	310,169,000	(310,169,000)	(100)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(3,092,818,702)	(586,727,096)	(2,506,091,606)	427.13
LAIN-LAIN	(821,766,319)	2,071,764	(823,838,083)	(39,765.05)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,182,520,877,757	3,070,280,505,749	112,240,372,008	3.66
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(63,699,990,517)	(30,817,225,132)	(32,882,765,385)	106.7
EKUITAS AKHIR	1,441,865,493,293	1,505,565,483,810	(63,699,990,517)	(4.23)

Keterangan :

FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : DITJEN TANAMAN PANGAN 03

Tgl Data : 11/05/26 7:25 AM
Tgl Cetak : 11/05/26 9:07 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	7,467,396,000	62,210,282,337	54,742,886,337	833.09	6,695,988,000	35,931,899,963	29,235,911,963	536.62
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	7,467,396,000	62,210,282,337	54,742,886,337	833.09	6,695,988,000	35,931,899,963	29,235,911,963	536.62
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	7,467,396,000	62,210,282,337	54,742,886,337	833.09	6,695,988,000	35,931,899,963	29,235,911,963	536.62
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	3,630,558,992,000	3,244,731,160,094	(385,827,831,906)	89.37	3,278,835,155,000	3,099,384,925,829	(179,450,229,171)	94.53
1. Belanja Pegawai	46,394,994,000	43,947,710,489	(2,447,283,511)	94.73	44,307,720,000	41,685,222,539	(2,622,497,461)	94.08
2. Belanja Barang	3,575,183,288,000	3,191,944,156,496	(383,239,131,504)	89.28	3,225,825,169,000	3,055,453,693,925	(170,371,475,075)	94.72
3. Belanja Modal	8,980,710,000	8,839,293,109	(141,416,891)	98.43	8,702,266,000	2,246,009,365	(6,456,256,635)	25.81
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : DITJEN TANAMAN PANGAN 03

Tgl Data : 11/05/26 7:25 AM
Tgl Cetak : 11/05/26 9:07 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	3,630,558,992,000	3,244,731,160,094	(385,827,831,906)	89.37	3,278,835,155,000	3,099,384,925,829	(179,450,229,171)	94.53
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : (238251) DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 12/05/26 7:21 AM
 Tgl Cetak : 12/05/26 10:24 AM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	218,000,000	220,000,000	(2,000,000)	(0.91)
Piutang Bukan Pajak	1,090,944,140	157,957,817	932,986,323	590.66
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(157,957,817)	(29,892,350)	(128,065,467)	428.42
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	932,986,323	128,065,467	804,920,856	628.52
Persediaan	650,096,382	834,337,218	(184,240,836)	(22.08)
JUMLAH ASET LANCAR	1,801,082,705	1,182,402,685	618,680,020	52.32
ASET TETAP				
Tanah	801,562,280,200	801,562,280,200	0	0.00
Peralatan dan Mesin	242,915,691,898	253,191,191,289	(10,275,499,391)	(4.06)
Gedung dan Bangunan	100,874,940,206	98,769,378,206	2,105,562,000	2.13
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,498,430,071	2,715,769,071	782,661,000	28.82
Aset Tetap Lainnya	88,473,675	88,473,675	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(256,757,533,281)	(255,664,166,972)	(1,093,366,309)	0.43
JUMLAH ASET TETAP	892,182,282,769	900,662,925,469	(8,480,642,700)	(0.94)
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	69,650,000	69,650,000	0	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(69,650,000)	(69,650,000)	0	0.00
Piutang Jangka Panjang lainnya	241,594,126	241,594,126	0	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(241,594,126)	(241,594,126)	0	0.00
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	0	0	0	
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	44,725,000	44,725,000	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	277,382,868,935	310,073,453,950	(32,690,585,015)	(10.54)
Aset Lain-lain	50,371,369,848	104,871,133,503	(54,499,763,655)	(51.97)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(47,659,952,179)	(102,013,420,059)	54,353,467,880	(53.28)
JUMLAH ASET LAINNYA	280,139,011,604	312,975,892,394	(32,836,880,790)	(10.49)
JUMLAH ASET	1,174,122,377,078	1,214,821,220,548	(40,698,843,470)	(3.35)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	277,240,673,934	263,712,407,313	13,528,266,621	5.13
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	277,240,673,934	263,712,407,313	13,528,266,621	5.13
JUMLAH KEWAJIBAN	277,240,673,934	263,712,407,313	13,528,266,621	5.13
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	896,881,703,144	951,108,813,235	(54,227,110,091)	(5.70)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (238251) DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 12/05/26 7:21 AM
Tgl Cetak : 12/05/26 10:24 AM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH EKUITAS	896,881,703,144	951,108,813,235	(54,227,110,091)	(5.70)
JUMLAH EKUITAS	896,881,703,144	951,108,813,235	(54,227,110,091)	(5.70)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,174,122,377,078	1,214,821,220,548	(40,698,843,470)	(3.35)

Keterangan :
FINAL

JAKARTA, 12 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


DR. YUDI SASTRO, SP, MP
NIP. 197207021998031002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : DITJEN TANAMAN PANGAN 03
SATUAN KERJA : DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 238251

Tgl Data : 08/05/26 1:22 AM
Tgl Cetak : 08/05/26 7:36 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,821,572,000	59,021,393,944	57,199,821,944	3240	1,780,290,000	30,785,292,146	(29,005,002,146)	1,729
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,821,572,000	59,021,393,944	57,199,821,944	3240	1,780,290,000	30,785,292,146	(29,005,002,146)	1,729
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1,821,572,000	59,021,393,944	57,199,821,944	3240	1,780,290,000	30,785,292,146	(29,005,002,146)	1,729
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	3,581,016,530,000	3,196,222,632,703	(384,793,897,297)	89	2,885,351,198,000	2,733,873,387,759	151,477,810,241	95
1. Belanja Pegawai	37,433,017,000	35,016,898,540	(2,416,118,460)	94	35,332,149,000	32,867,615,763	2,464,533,237	93
2. Belanja Barang	3,537,352,021,000	3,155,111,890,305	(382,240,130,695)	89	2,843,016,448,000	2,699,649,295,426	143,367,152,574	95
3. Belanja Modal	6,231,492,000	6,093,843,858	(137,648,142)	98	7,002,601,000	1,356,476,570	5,646,124,430	19
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : DITJEN TANAMAN PANGAN 03
SATUAN KERJA : DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 238251

Tgl Data : 08/05/26 1:22 AM
Tgl Cetak : 08/05/26 7:36 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	3,581,016,530,000	3,196,222,632,703	(384,793,897,297)	89	2,885,351,198,000	2,733,873,387,759	151,477,810,241	95
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 8 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DR. YUDI SASTRO, SP, MP
NIP. 197207021998031002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (238251) DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 08/05/26 1:22 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 7:36 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	5,199,360,037	4,429,271,777	770,088,260	17.386
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	5,199,360,037	4,429,271,777	770,088,260	17.386
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	5,199,360,037	4,429,271,777	770,088,260	17.386
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	35,086,973,576	32,976,174,763	2,110,798,813	6.401
Beban Persediaan	1,224,047,975	2,246,274,439	(1,022,226,464)	(45.508)
Beban Barang dan Jasa	54,512,865,034	67,646,780,658	(13,133,915,624)	(19.415)
Beban Pemeliharaan	6,777,188,445	6,228,523,346	548,665,099	8.809
Beban Perjalanan Dinas	97,837,599,871	151,885,179,710	(54,047,579,839)	(35.584)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2,993,670,557,250	2,484,062,871,668	509,607,685,582	20.515

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (238251) DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 08/05/26 1:22 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 7:36 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	14,670,080,486	17,137,489,419	(2,467,408,933)	(14.398)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	128,065,467	0	128,065,467	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,203,907,378,104	2,762,183,294,003	441,724,084,101	15.992
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,198,708,018,067)	(2,757,754,022,226)	(440,953,995,841)	15.99
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	487,842,918	618,405,500	(130,562,582)	(21.113)
Pendapatan Pelepasan Aset	492,668,000	618,405,500	(125,737,500)	(20.333)
Beban Pelepasan Aset	4,825,082	0	4,825,082	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7,361,872,007	25,737,614,869	(18,375,742,862)	(71.396)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7,361,872,007	25,737,614,869	(18,375,742,862)	(71.396)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7,849,714,925	26,356,020,369	(18,506,305,444)	(70.217)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,190,858,303,142)	(2,731,398,001,857)	(459,460,301,285)	16.821
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,190,858,303,142)	(2,731,398,001,857)	(459,460,301,285)	16.821

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 8 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sastro', with a long horizontal line extending to the right.

DR. YUDI SASTRO, SP, MP
NIP. 197207021998031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : (238251) DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 08/05/26 12:35 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 7:36 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	951,108,813,235	972,944,236,322	(21,835,423,087)	(2.24)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,190,858,303,142)	(2,731,398,001,857)	(459,460,301,285)	16.82
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(663,189,138)	(352,036,726)	(311,152,412)	88.39
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(183,105,279)	(352,036,726)	168,931,447	(47.99)
LAIN-LAIN	(480,083,859)	0	(480,083,859)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,137,294,382,189	2,709,914,615,496	427,379,766,693	15.77
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(54,227,110,091)	(21,835,423,087)	(32,391,687,004)	148.34
EKUITAS AKHIR	896,881,703,144	951,108,813,235	(54,227,110,091)	(5.7)

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 8 Mei 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN


 DR. YUDI SASTRO, SP, MP
 NIP. 197207021998031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (238251) DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 08/05/26 12:35 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 7:36 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	3,196,222,632,703
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	59,021,393,944	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	492,668,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	74,917,400
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	1,639,308
3.0	425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	0	584,250,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	978,913,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	591,501,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,968,139,329
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	31,357,949
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	53,298,007,958
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	23,612,545,780	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	319,057	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,618,778,056	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	485,015,681	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	426,860,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,375,347,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	273,645,311	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,195,364,520	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	2,127,651,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	545,070,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,784,173,785	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	46,350	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	101,746,682	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	24,956,437	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	87,618,666	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	102,317,390	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	211,512,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	76,410,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4,049,571,000	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	91,188,050	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,621,300	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	700,240,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	131,795,900	0
3.0	521211	Belanja Bahan	13,317,711,229	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	13,152,550,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	347,115,873	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (238251) DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 08/05/26 12:35 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 7:36 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	360,017,183	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	424,513,747	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	480,843,675	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	2,304,009,041	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	60,236,929	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	101,913,243	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	131,901,300	0
3.0	522141	Belanja Sewa	8,919,166,847	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	888,840,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	10,420,918,009	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,004,200,705	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,381,403,378	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	175,007,081	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	83,363,516,361	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,256,118,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	360,903,152	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,620,404,191	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	96,159,410	0
3.0	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1,255,250,946,398	0
3.0	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1,728,755,380,744	0
3.0	526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	9,976,100,000	0
3.0	526313	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Jasa	218,297,793	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,618,629,193	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	631,036,665	0
3.0	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	47,620,000	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2,155,653,000	0
3.0	534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	285,755,000	0
3.0	534121	Belanja Modal Irigasi	355,150,000	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	8,531,204
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	700
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	3,090,394
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	1,540,397
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	3,250,000
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	3,630,000
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	651,780
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	10,110,300
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	1,670,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (238251) DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 08/05/26 12:35 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 7:36 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	4,400
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	7,391,000
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	52,900,000
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	4,770,000
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	6,250,101
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	2,700,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	122,060,236
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	12,024,000
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	1,325,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	15,729,897
3.1	526112	Pengembalian Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	6,550,000
JUMLAH			3,255,508,206,056	3,255,508,206,056

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 8 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DR. YUDI SASTRO, SP, MP

197207021998031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (238251) DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 08/05/26 1:22 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 7:36 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	218,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	1,090,944,140	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	157,957,817
0.0	117111	Barang Konsumsi	79,024,765	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	831,935	0
0.0	117131	Bahan Baku	464,426,602	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	105,813,080	0
0.0	131111	Tanah	801,562,280,200	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	242,915,691,898	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	100,874,940,206	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	456,587,000	0
0.0	134112	Irigasi	2,193,334,600	0
0.0	134113	Jaringan	848,508,471	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	88,473,675	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	226,987,030,702
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	28,521,759,103
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	50,451,550
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	672,013,983
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	523,277,943
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	3,000,000
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	69,650,000	0
0.0	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	241,594,126	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	69,650,000
0.0	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	241,594,126
0.0	162151	Software	44,000,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	725,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	277,382,868,935	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	50,358,567,649	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	12,802,199	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	47,603,149,980
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	44,000,000
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	12,802,199
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	178,638,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	277,062,035,934
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,196,222,632,703
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	59,021,393,944	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	93,143,430

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (238251) DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 08/05/26 1:22 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 7:36 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	391111	Ekuitas	0	951,108,813,235
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	183,105,279	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	480,083,859	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	492,668,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	74,917,400
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	1,639,308
3.0	425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	0	584,250,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	978,913,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	591,501,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,968,139,329
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	31,357,949
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,286,469,058
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	44,045,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	23,604,010,612	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	318,357	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,615,687,662	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	483,475,284	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	423,610,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,371,717,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	273,645,311	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,194,712,740	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	2,158,530,700	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	543,400,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	1,784,173,785	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	41,950	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	101,746,682	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	24,956,437	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	87,618,666	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	102,317,390	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	240,601,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	76,410,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	4,049,571,000	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	81,603,050	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,621,300	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	700,240,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	131,795,900	0
3.0	521211	Beban Bahan	13,299,393,621	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (238251) DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 08/05/26 1:22 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 7:36 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	13,072,337,500	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	347,115,873	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	2,310,035,610	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	60,181,781	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	101,913,243	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	131,901,300	0
3.0	522141	Beban Sewa	8,919,166,847	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	884,070,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	10,420,918,009	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,997,950,604	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,378,703,378	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	82,662,244,485	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,189,970,517	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	351,797,652	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,537,427,807	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	96,159,410	0
3.0	526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	9,976,100,000	0
3.0	526313	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Jasa	218,297,793	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10,721,988,713	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,707,257,947	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	21,375,550	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	49,751,064	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	23,411,437	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	146,295,775	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	237,869,661	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	344,577,820	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	55,956,643	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1,255,244,396,398	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1,728,231,763,059	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	672,833,889	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	313,344,425	0
3.0	594249	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	128,065,467	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	4,825,082	0
JUMLAH			4,742,605,850,749	4,742,605,850,749

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 8 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sastro', with a stylized flourish at the end.

DR. YUDI SASTRO, SP, MP
NIP. 197207021998031002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Juni 2026
Direktur Jenderal



Dr. Yudi Sastro, SP, MP
NIP. 197207021998031002

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Semester II Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Juni 2026
Direktur Jenderal



Dr. Yudi Sastro, SP, MP
NIP. 197207021998031002

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Yudi Sastro, S.P., MP.
NIP 197207021998031002

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Yudi Sastro, S.P., MP.
NIP 197207021998031002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Yudi Sastro, S.P., MP.
NIP. 197207021998031002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Yudi Sastro, S.P., MP.
NIP. 197207021998031002